

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MAKASSAR TA'
TIDAK RANTASA DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Oleh

NOVRI ARDI WIRANATA NUR

E 121 10 903

**JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MAKASSAR TA'
TIDAK RANTASA DI KOTA MAKASSAR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

NOVRI ARDI WIRANATA NUR

E121 10 903

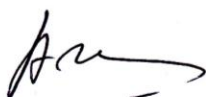
Telsah dipertahankan didepan Panitia Ujian SKRIPSI

Pada Tanggal 30 November 2015

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, M.A
NIP. 19501017 198003 1 002

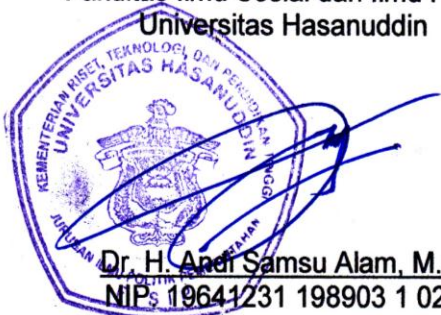
Pembimbing II,



Andi Murfi S. sos, M. si
NIP. 19720328 200012 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu
Politik/Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630921 198702 2 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MAKASSAR TA'
TIDAK RANTASA DI KOTA MAKASSAR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

NOVRI ARDI WIRANATA NUR

E 121 10 903

Telah Diperbaiki

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi



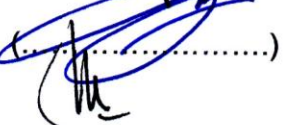
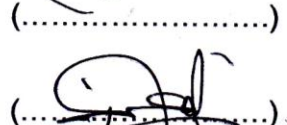
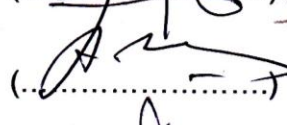


Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada Hari Senin, Tanggal 30 November 2015

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. H.A.Gau Kadir, M.A	(..... )
Sekretaris	: A. Lukman Irwan, M. Si	(..... )
Anggota	: Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si	(..... )
Anggota	: Dr. Hj. Nurlinah, M.Si	(..... )
Anggota	: Dr. A. M. Rusli, M. Si	(..... )
Pembimbing I	: Prof. Dr. H.A.Gau Kadir, M.A	(..... )
Pembimbing II	: A. Murfhi, S.Sos, M.Si	(..... )

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kota Makassar" dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa *semua akan indah pada waktunya*.

Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aristina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS.
4. Ibu Dr. H. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Pemerintahan FISIP UNHAS.
5. Bapak Prof. Dr.H.A. Gau Kadir, MA selaku pembimbing I dan Bapak Andi Murfi, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang telah menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dosen Fisip Unhas, khususnya dosen Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing, mendidik, memberikan pengetahuan dan nasihat-nasihat serta para pegawai di lingkup Fisip Unhas yang telah memberikan pelayanannya selama ini dalam kelancaran administrasi dan perkuliahan kami.
7. Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Manggala beserta jajarannya yang telah membantu

dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di wilayah kerjanya.

8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Nurwan (Alm). dan Ibunda tercinta Nurlaela Abu yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Sang motivator buat penulis sehingga bisa sampai pada saat ini. Hingga kapanpun penulis takkan mampu membalasnya. maaf karena seringnya menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti, dan memberi kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayah dan ibu..
9. Saudara Penulis, Nirla Pratiwi Nurwan, Lisa Sasgia Nurwan, Suwaril Dzahab Nurwan, Silva Indah Sari Nurwan, Novrita Hairin Putri Nurwan, dan sibungsu Abd. Rajab Nurwan. Terima kasih atas segala bantuannya, maaf atas semua perbuatan yang telah menyakiti.
10. Seluruh keluarga di "BUMI ORANGE" (HIMAPEM FISIP UNHAS). Kanda Revolusioner (05), Rez-Publica (06), Renaissance (07), Glasnost (08), Aufklarung (09), Volksgeist (10), Enlighment (11), Fraternity (12), Lebensraum (13), Fidelitas (14) , Federasi (15) dan generasi yang akan datang. Terima kasih telah mengukir sejarah

dalam kehidupan penulis. Teruslah berkarya, melahirkan generasi-generasi *merdeka* dan *militan*.

11. Keluarga Kecil UKM Pencak Silat Unhas yang telah mengajarkan banyak arti kehidupan, tidak ada kata yang dapat mewakili apa yang penulis rasakan.
12. Tapak Suci Kota Palopo dan Keluarga Kecil Tapak Suci Unhas yang telah menemani dan memberi banyak pelajaran, terimakasih telah menjadi guru dan sahabat bagi penulis.
13. Saudaraku "Volksgeist 2010". Anugrah Rachmat, , Ahmad Yulisar, Ryan Hidayat, Ahmad Aksan, Surya Arisman, Reza Syamsuri, Kurniawan Akbar, Nasaruddin, Nurul Fibrianti, Evi Mulyasari, Widyani, Reski Sri, Nely Sari, Alfiani eka sari, A. Meegy, Ayyub siswanto, Ika Monika, A. Ilmi, Dina Astuti, Nana Listiana, Tanti Prastuti, Novianti, A. Yeni Yuniarti, A. Nurhidayah, Metalia intan, Nurkumala Sari, A. Samsu Rijal, Bondan Arizona, Ahmad Akmaltu, Wahyu Tarman, Wahyu Arfansyah, Tasbih, Kasbih, Wandu, Muh. Yusuf, Hastutiyani, A. Riska, Ismail, Muh. Ikram, Dian Riska, Rimba, Firman, Amal, Sambolangi, terima kasih telah mengajarkan arti sebuah kebersamaan dan arti sebuah persaudaraan meski singkat kalian akan selalu menjadi yang terbaik dan semoga kita akan selalu bersama meski dilain tempat.

14. Angkatan 2010 FISIP UNHAS, terima kasih telah mewarnai perjalanan ini banyak dinamika dan proses dialektika yang menjadi pelajaran hidup bagi penulis.

15. Teman-teman KKN Tematik Gel. 87 Pulau Miangas. terima kasih atas pembelajaran yang telah kalian berikan, semoga masa itu selalu teringat dalam hati kita masing-masing dan hubungan persaudaraan yang terbangun masih terjaga.

16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua kerjasamanya, semoga kita diberi umur panjang sehingga suatu saat kita berjumpa lagi, Amin Ya Robbal Alamin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi banyak pihak terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahkmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin Ya Robbal Alamin.

Makassar November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR ISTILAH.....	x
INDEKS.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan.....	7
2.2. Program.....	11
2.3. Efektivitas.....	12
2.4. Makassar Ta' Tidak Rantasa.....	13
2.5. Kerangka Konsep.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	19
3.2. Tipe Penelitian.....	19
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.4. Analisis Data.....	21
3.5. Definisi Oprasional.....	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Profil Kota Makassar.....	24
4.1.1.	Letak Geografis Kota Makassar.....	25
4.1.2.	Keadaan Penduduk.....	28
4.1.3.	Visi Kota Makassar.....	29
4.1.4.	Misi Kota Makassar.....	31
4.1.5.	Tujuan dan Sasaran.....	33
4.1.6.	Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan.....	34
4.1.7.	Tugas Pokok dan Fungsi.....	34
4.1.8.	Kecamatan Tamalanrea.....	36
4.1.9.	Kecamatan Manggala.....	37
4.1.10.	Kecamatan Wajo.....	38
4.2.	Sampah Di Kota maakassar.....	39
4.2.1.	Timbulan Sampah.....	39
4.2.2.	Teknis Pembuangan Sampah.....	40
4.3.	Konsep Pelaksanaan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa....	42
4.3.1.	Latar Belakang Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa.....	42
4.3.2.	Desain Pelaksanaan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa....	44
4.3.2.1.	Jargon Pendukung Gemar MTR Rantasa.....	46
4.3.2.2.	Kegiatan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa.....	48
4.3.2.3.	Pelibatan Elemen Pendukung.....	51
4.3.3.	Efektivitas Pelaksnaaan Program Gemar MTR.....	53
4.3.3.1.	Pencapaian Tujuan.....	54
4.3.3.2.	Integrasi.....	69
4.3.3.3.	Adaptasi.....	72
4.3.4.	Analisis Kritis.....	77
4.3.4.1.	Analisis teori kebijakan.....	77
4.3.4.2.	Kekurangan Program Gemar MTR.....	78

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1:	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2013
Tabel 4.2:	Data Timbulan Sampah Kota Makassar Tahun 2014

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1:	Kerangka Konseptual Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa.
Gambar 4.1:	Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar
Gambar 4.2:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

DAFTAR ISTILAH

A'bbulo Sibatang Lompoayang	:	Nama Kegiatan yang diadakan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkenalkan Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa
Adaptasi	:	Penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran
AMF	:	Asean Mayors Forum
Bank Sampah	:	Suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah
Brigadir 08	:	Organisasi yang membantu dan mendukung program pemerintah Kota Makassar.
Desain	:	Rancangan
Door To Door	:	Mengunjungi Rumah / Dari rumah ke rumah
Efektivitas	:	Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai
Elemen Pendukung	:	Bagian yang penting dan membantu dalam mendukung kegiatan
FORKASIH	:	Forum Kampung Bersih
Gemar MTR	:	Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa
Inovasi	:	penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah

	dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)
Integrasi	: pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya
Jargon	: Kata khusus yang digunakan dalam mensosialisasikan program
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
K3	: Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
Lautan sampah	: Sampah yang menumpuk dan berserakan, tempat yang dipenuhi sampah
LISA	: Lihat Sampah Ambil
Longgar	: Lorong Garden
Lorong	: Jalan Kecil
MABASA	: Makassar Bebas Samapah
MABELO	: Makassar Bersih Lorong
MAPALA	: Mahasiswa Pecinta Alam
Misi	: suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan lembaga dalam usaha mewujudkan Visi.
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Perda	: Peraturan Daerah
Perwali	: Peraturan Walikota
Purna Praja	: Sebutan untuk alumni Praja IPDN

Prabu	:	Pahlawan Urang Bandung, relawan yang menegakkan Perda K3 di Kota Bandung
Relawan	:	Orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan)
Sampah anorganik	:	sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sinterik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang
Sampah organik	:	barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
Timbulan sampah	:	volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu
3R	:	reduce, reuse dan recycle
Visi	:	tujuan lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan

INDEKS

A

A'bbulo Sibatang Lompoayang 2,
55

Adaptasi 13, 18, 22, 54, 72, 77,
82

AMF 58

B

Bank Sampah 50, 51, 53, 67, 68,
81

Brigadir 08 53.

D

Desain 5, 6, 18, 44, 45, 51, 70,
82

Door To Door 4

E

Efektivitas 5, 6, 7, 12, 13, 18, 22,
53, 54, 56, 57, 62, 68, 70,
71, 79, 82

Elemen Pendukung 18, 45,
51,70, 75, 82

F

FORKASIH 52, 72, 73, 77

G

Gemar MTR 2, 4, 5, 15, 16, 23,
45, 46, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 65, 66,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 82, 83,

I

Inovasi 2, 43

Integrasi 13, 18, 22, 54, 69, 70,
71, 72,

J

Jargon 18, 45, 46, 47, 70, 71, 82

K

KNPI 53, 75

K3 3

L

Lautan sampah 3

LISA 2, 46, 70, 82

Longgar 48, 57, 58, 59, 82

Lorong 32, 40, 41, 46, 47, 48, 49,
53, 57, 58, 59, 60, 63, 70,
82,

M

MABASA 46, 47, 70, 82

MABELO 46, 47, 70, 82

MAPALA 53

Misi 4, 31, 32, 33, 63

O

Ormas 51, 53, 63, 64, 74, 77, 82,
83

P

Perda 3, 4, 78, 83

Perwali 3, 4, 78, 83

Purna Praja 53, 74, 75,

Prabu 3

R

Relawan 3, 73, 75,

S

Sampah anorganik 50, 51, 53, 80

Sampah organik 50, 80

SKPD 4, 15, 16, 19, 23, 40, 52,
73, 74

T

Timbulan sampah 1, 39

R

3R 3, 50, 53

V

Visi 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 57

INTISARI

Novri Ardi Wiranata Nur, Nomor Induk **E12110903**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa di Kota Makassar” Di bawah bimbingan Prof.Dr.H.Andi Gau Kadir, M.A sebagai pembimbing I dan Andi Murfi, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desai Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa serta efektivitas pelaksanaan program.

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, dan penelusuran data secara online

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR) adalah program yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih. Dalam mewujudkan tujuan dari program ini digunakan jargon pendukung seperti LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Selain itu beberapa kegiatan yang digunakan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, Sosialisasi, dan Gerakan Sampah Tukar Beras.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diatas maka peluang untuk merubah Kota Makassar terbebas dari masalah persampahan cukup besar hal ini juga dapat membantu visi Pemerintah Kota yaitu Makassar Menuju Kota Dunia yang Nyaman Bagi Semua.

ABSTRACT

Novri Ardi Wiranata Nur, ID Number E12110903, Study Program of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Making thesis titled "Analysis Implementation of Program *Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa* in Makassar" Under the guidance of Prof.Dr.H .Andi Gau Kadir, MA as first preceptor and Andi Murfi, S. Sos., M.Si as second preceptor.

This study purposed to describe the design of the Program *Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa* and effectiveness of program implementation.

The method used is qualitative research, is a method to describe and explaining the results in writing. Data is collected by using technique of literature study, observation, interviews, and online search.

Based on the research that has been done, the program of *Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR)* is a program that purposed to change the mindset of people to clean living. To realize the purpose of the program some supporting tagline are used like *LISA (Lihat Sampah Ambil)*, *MABELO (Makassar Bersih Lorong)*, *MABASA (Makassar Bebas Sampah)* and *Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa*. In addition, some activities that are used to change the mindset of people to clean living is *Lorong Garden (Longgar)*, communal works, socialization, and exchange garbage with rice movement.

According to the activities that have done, the chance to make Makassar resolve the garbage problem is big enough, this thing also can help the local government vision that is Makassar to be the world city and comfort for all.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota berjalan seiringan dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut membuat masalah-masalah baru seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, permukiman kumuh dan juga volume sampah yang terus meningkat.

Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah. Lebih khusus pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tak luput dari permasalahan persampahan. Jumlah penduduk yang begitu besar menghasilkan timbulan sampah yang besar pula. Pertambahan

jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini tentu merupakan masalah cukup besar yang dimiliki oleh pemerintah kota Makassar.

Kepemimpinan Dany Pomanda dan Syamsul Rizal telah melakukan inovasi-inovasi dalam menangani masalah kebersihan kota Makassar. Pada periode ini pemerintah kota mencoba merekonstruksi pemikiran masyarakat untuk cinta dan peduli terhadap kebersihan.

Dalam menciptakan kota bersih dan bebas dari masalah persampahan, saat ini telah mengenal istilah Lihat Sampah Ambil (LISA) dan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR) yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih. Berfokus pada Program Makassar Ta tidak rantasa. Studi ini menjelaskan tentang pelaksanaan program Makassar Ta Tidak Rantasa sebagai salah satu kajian dalam menjelaskan konsep pelaksanaan kebijakan walikota Makassar.

Gerakan Makassar Ta tidak rantasa adalah salah satu program pemerintah kota makassar dalam mewujudkan makassar yang bersih dan sehat. Gerakan yang dicanangkan pada 15 juni 2014 diperkenalkan pada warga Kota Makassar pada acara A'bbulo Sibatang Lompoayang digelar di *Celebes Convention Centre* (CCC) Jalan Metro Tanjung Bunga (Ujung pandang ekspres terbit 16 juni 2014). Program ini diharapkan agar masyarakat dapat mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan

sehari-hari, karena tanpa dukungan masyarakat maka Program Makassar Ta Tidak Rantasa tidak dapat berjalan dengan baik.

Setelah sembilan bulan berjalannya program ini, tampaknya kondisi Kota Makassar masih belum banyak berubah dari sisi kebersihan. Masih banyak ditemui sampah yang berserakan dan juga tumpukan sampah di pinggir jalan. Belum lagi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.

Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia dimana masyarakatnya telah menyadari akan pentingnya kebersihan. Seperti kota Bandung yang pada tahun 2006 dikenal dengan Bandung Lautan sampah, akan tetapi saat ini kebersihan di Kota Bandung telah meningkat. Kota Bandung telah menjalankan Perda No 11 tahun 2005 dalam penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan). Walikota Bandung sejak tanggal 1 Desember 2014 telah menegaskan akan memberikan denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu Walikota Bandung juga membuat Perwali Nomor 522 tahun 2007 yang mengatur tatacara pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyelenggaraan K3. Walikota Bandung juga membentuk relawan denda buang sampah atau Prabu, yaitu pahlawan urang Bandung. Selain Kota Bandung, Kota Surabaya juga memiliki hal cara yang baik dalam mengatasi kebersihan lingkungan, dengan melaksanakan program *reduce, reuse* dan *recycle* (3R) Kota Surabaya telah berhasil menjadi kota yang bebas dari masalah persampahan.

Walikota Makassar dalam menjalankan Program Gemar MTR telah membuat instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas kebersihan agar melaksanakan program yang mendukung MTR. Khusus untuk lurah, mensosialisasikan Gemar MTR kepada masyarakat dari rumah ke rumah (*door to door*) melalui brosur-brosur. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum tahu yang dimaksud dengan Gemar MTR dan bagaimana Konsep pelaksanaannya sehingga belum berdampak terhadap perubahan pola pikir masyarakat.

Melihat kondisi di atas maka wajar jika sampai saat ini program Makassar Ta Tidak Rantasa tidak tereliasi dengan baik. Kekuatan dalam menjalankan Gemar MTR juga belum ada, baik Perda maupun Perwali yang membahas pengolahan sampah secara khusus di Kota Makassar. Dari hal tersebut dapat dipertanyakan kesiapan pemerintah terutama aparatur pemerintah akan kesiapannya dalam menjalankan Makassar Ta Tidak Rantasa. Berbeda halnya dengan Kota lain yang dalam menjaga kebersihan memiliki perda yang mengatur hal tersebut dan Perwali yang juga mendukung Program dalam menghadapi masalah persampahan tersebut.

Dalam pandangan lain, keberadaan sebuah program sebagai instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dapat dilihat dari tinjauan manajemen stratejik bahwa program merupakan turunan yang berkesinambuanagn dari visi dan misi pemerintah daerah dimana hal tersebut memiliki tujuan sasaran serta kebijakan-kebijakan

yang didesain sedemikianrupa sehingga melahirkan program dan kegiatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari kesinambungann instrumen-instrumaen di atas.

Keberadaan program Makassar Ta Tidak Rantasa yang tidak memiliki dasar kebijakan yang tidak jelas dikhawatirkan tidak akan terealisasi dengan maksimal dikarenakan ada proses yang tidak berkesinambing dalam perumusan program yang secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak terhadap pelaksanaan program sebab rantai-rantai proses ini akan membawa visi pada kegiatan nyata dan panduan oprasional lapangan untuk aparat pemerintah.

Berdasarkan realita di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui desain program Makassar Ta tidak rantasa di Kota Makassar dan efektivitas pelaksanaan program Gemar MTR tersebut sehingga penulis mengangkat judul **“Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa di Kota Makassar”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini menganalisa bagaimana pelaksanaan program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa di Kota Makassar dan diturunkan dalam poin rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana desain program gerakan Makassar Ta tidak rantasa di Kota Makassar?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Makassar Ta tidak Rantasa di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini maka tujuannya adalah:

1. Mengetahui desain pelaksanaan program gerakan Makassar Ta tidak Rantasa di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program gerakan Makassar Ta tidak rantasa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Manfaat Bagi Penulis:
Memberikan pemahaman yang lebih kepada penulis dalam mengetahui Konsep Gerakan Makassar Ta tidak rantasa di Kota Makassar secara umum.
2. Manfaat Bagi Pemerintah
Memberikan pandangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam menentukan arah kebijakan dalam menangani masalah persampahan dan menyukseskan program kerja Makassar Ta tidak Rantasa.
3. Manfaat Lainnya
Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama dalam menjelaskan penerapan program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan teori yang kokoh untuk mendukung dalam penulisan ini. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat yang bersumber dari yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan buku referensi lainnya.

Adapun yang menjadi landasan penulisan ini meliputi Kebijakan, Program, efektivitas dan Makassar Ta Tidak Rantasa.

2.1. Kebijakan

Secara umum Kebijakan merupakan pilihan-pilihan alternatif berdasarkan prinsip—prinsip tertentu. Perlu penjelasan lebih jauh akan pengertian kebijakan dan kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menjelaskan akan pengambilan keputusan yang diambil oleh aparat pemerintah.

Duhn (1981) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai “hubungan dari unit pemerintahan dengan lingkungannya” (Ali dan Alam, 2012). Menurut Dye (1981) kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (Pasolong, 2007).

James Anderson (1984) dalam bukunya *Public Policy Making* mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian kegiatan yang

mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan” (Nugroho, 2012).

Untuk mengetahui jenis-jenis kebijakan publik dapat diketahui melalui Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 yang menjelaskan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan Daerah (Pasolong, 2007).

Proses perumusan kebijakan menurut Ali dan Alam (2012) yaitu (1) pengagendaan isu, (2) Penetapan isu menjadi agenda pemerintah, (3) Perumusan kebijakan dan program serta pengesahannya, (4) Pernyataan kebijakan, (5) Implementasi kebijakan, (6) Tindakan kebijakan, dan (7) Dampak kebijakan.

Dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan publik, menurut Dunn (1994) proses kebijakan publik memiliki tahap yaitu (1) Penetapan agenda kebijakan, (2) Adopsi kebijakan, (3) Penentuan kebijakan, (4) Evaluasi kebijakan (Pasolong, 2007). Sebagai suatu proses kebijakan Wahab (2008) menggambarkan siklus proses kebijakan kebijakan yaitu (1) Penyusunan Agenda, (2) Perumusan Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan, (4) Evaluasi Kebijakan, (5) Perubahan Kebijakan dan, (6) Pengakhiran Kebijakan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam rangka pembuatan kebijakan, Pasolong (2007) menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan berawal dari analisis kebijakan, pengesahan kebijakan, selanjutnya implementasi kebijakan dan setelah itu evaluasi kebijakan.

1. Analisis kebijakan

Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu (Dunn, 2003).

Nugroho (2006) menjelaskan bahwa “analisis kebijakan merupakan pemahaman akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan” (Pasolong, 2007). Menurut Pasolong (2007) proses analisis kebijakan dibedakan atas penstrukturan masalah atau identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif, dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan.

2. Pengesahan Kebijakan

Pasolong (2007) mengatakan bahwa proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Landasan utama untuk melakukan pengesahan kebijakan adalah variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya.

M. Irfan Islami (1986) "Proses pengesahan kebijakan dapat pula dikatakan sebagai pembuatan keputusan. Oleh karena itu, suatu usulan kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan dapat disetujui oleh pengesah kebijakan" (Pasolong, 2007).

Melihat hal di atas maka jelas untuk menjadikan suatu usulan kebijakan sah secara hukum maka dibutuhkan sesuatu pengesahan atau legitimasi dari seseorang atau badan yang berwenang. Dengan demikian kebijakan yang telah memiliki legitimasi maka akan mengikat masyarakat atau badan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut telah dapat diimplementasikan.

3. Implementasi kebijakan

Grindle (1980), implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapatmungkin mempengaruhinya (Pasolong, 2007). Grondo (1986) mengatakan bahwa implemntasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Pasolong, 2007).

Dalam implemntasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain hambatan politik, ekonomi, lingkungan, dan kekurangan SDM. Selain itu kelemahan istitusi juga merupakan hal yang sangat krusial yang dihadapi dalam mengimplentasikan kebijakan.

4. Evaluasi Kebijakan

Badjuri dan Admin (2003) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting kebijakan (Pasolong, 2007).

Evaluasi digunakan untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi ini tidak hanya sebatas menilai kebijakan-kebijakan saja akan tetapi lebih jauh evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan dan seberapa besar persentase keberhasilan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan dan sebagai pertanggungjawaban hasil dari suatu kebijakan.

2.2. Program

Pada dasarnya program merupakan wujud nyata yang berisi kegiatan dan tindakan-tindakan yang sistematis dari suatu kebijakan yang masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran serta sarana. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka dibuatlah program yang secara operasional dapat dilaksanakan oleh setiap perangkat kerja.

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah bentuk implementasi program hal ini sesuai yang disebutkan oleh Grindle (1980) bahwa "Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect" (Tachjan, 2006)

.Program bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan-kegiatan operasional, sehingga salah satu yang perlu dijelaskan dalam penyusunan program adalah penjabaran dari setiap kegiatan yang akan dijalankan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah maupun uraian dari setiap orang yang terlibat didalamnya.

2.3. Efektivitas

Efektivitas atau efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil. Menurut William Dunn (2003) efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai.

Menurut Richard M. Steers (1985) "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan Sasarannya tanpa melupakan cara dan sumber daya serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya"

Dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program atau organisasi, menurut Martin dan Lubis (1987) ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan Richard M. Steers (1985) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan untuk mengukur efektivitas dapat dilihat dari sisi:

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.4. Makassar Ta tidak Rantasa

Makassar Ta Tidak Rantasa (MTR) merupakan Program yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar dalam rangka meningkatkan kebersihan di Kota Makassar. Program ini di deklarasikan oleh Walikota

Makassar pada acara akbar A'bbulo Sibatang Lompoa yang dilaksanakan di Gedung Celebes Conventin Center (CCC) 15 Juni 2014.

Tidak Rantasa dalam bahasa makassar berarti tidak kotor atau tidak jorok. Secara sosiologis Walikota dan Wakil Walikota Makassar menggunakan bahasa Tidak Rantasa untuk membangkitkan Siri' Na Pacce bugis makassar yang akan selalu malu jika tidak menjaga kebersihan.

Kebijakan Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan kota dimulai dari kesadaran semua warga kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah kota makassar sadar bahwa konsep MTR perlu dukungan dari masyarakat sehingga pemerintah kota akan selalu mensosialisasikan dan mengajak masyarakat terus menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat.

Dalam beberapa diskusi dan pidato yang disampaikan Walikota Makassar di depan masyarakat mengatakan bahwa Rantasa dapat diartikan secara luas, tidak hanya diartikan sebagai sampah yang berserakan atau kanal, got dan lingkungan yang penuh sampah dan kotor. Akan tetapi, menyangkut ketertiban pedagang kaki lima, pasar, lokalisasi dan drainase. Selain itu, Rantasa juga harus dimaksudkan dalam hal membersihkan perilaku korupsi, penyuapan di instansi pemerintah sehingga good governance dapat terealisasi.

Berdasarkan surat keputusan Walikota Kota Makassar terhadap dinas-dinas dan kecamatan se-Kota Makassar maka program ini telah dijalankan dengan cukup baik. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mencapai Kota Makassar yang tidak rantasa. Mulai dari di bersihkannya kanal-kanal yang ada, membersihkan drenase di setiap sudut-sudut jalan, serta dengan adanya truk sampah yang baru dengan model yang lebih baik yang diberikan nama truk "Tangkasa Ki" dengan cup penutup sehingga sampah yang diangkut baunya tidak menyebar kemana-mana.

Program Makassar Ta Tidak Rantasa ini menjadikan kecamatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaannya. Setiap kecamatan telah diberikan fasilitas berupa motor sampah sebanyak 2 buah. Selain itu truk sampah Tangkasa Ki juga terus beroperasi dalam membantu mengumpulkan sampah-sampah di rumah-rumah warga.

Pelaksanaan program tidak di atur dalam Peraturan daerah maupun Peraturan Walikota, hanya didasari atas Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar, Sasaran program ini adalah meningkatkan kapasitas penanganan sampah dan kebersihan dengan rencana strategis yaitu menanamkan budaya bersih dalam masyarakat dan

peningkatan kapasitas penanganan sampah, sehingga melahirkan program yaitu Makassar Ta Tidak Rantasa dengan targetan awal tahun 2014 ditujukan kepada 20 kelurahan dan padaa tahun 2018 yaitu 143 kelurahan telah melaksanakan program Gemar MTR ini. Dalam RPJMD indikator keberhasilan program ini adalah Masyarakat Kota Makassar merasa puas terhadap pengelolaan sampah ditingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga SKPD yang bertanggung jawab terhadap program ini adalah kecamatan dan kelurahan se-Kota Makassar.

2.5. Kerangka Konsep

Makassar Tidak Rantasa adalah Program dari Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah kebersihan. Program ini dilaksanakan atas surat keputusan Walikota Makassar kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar.

Menurut Walikota Makassar bapak Danny Pomanto “MTR ini adalah gerakan rekonstruksi moral yaitu dengan merekonstruksi cara pandang masyarakat untuk hidup bersih terutama berkaitan dengan sampah” (Badan arsip dan perpustakaan makassar, 2014).

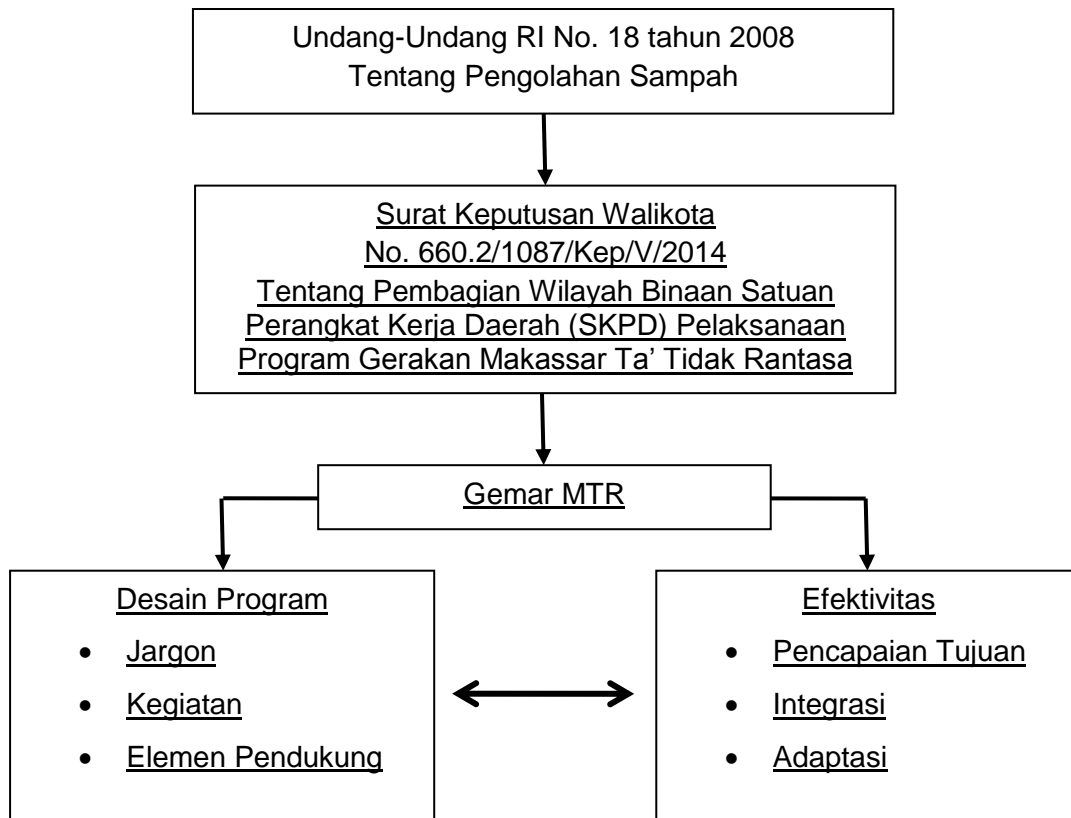
Terdapat dua masalah besar yang dimiliki kota makassar jika membahas persampahan yaitu yang pertama masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat dan yang kedua adalah manajemen persampahan yang kurang maksimal.

Dengan melihat kondisi di atas maka dukungan masyarakat dalam pelaksanaan MTR untuk mengatasi masalah persampahan ini sangatlah dibutuhkan karena tanpa partisipasi yang lebih dari masyarakat maka program ini tidak bisa terlaksana.

Penanganan masalah persampahan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan berkesinambungan. Untuk itu kerja sama antar masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. maka dari itu dalam pelaksanaan program MTR ini diawali dari lingkup pegawai Pemkot Makassar dan unsur musyawrah pimpinan daerah (Muspida) kota Makassar sebagai contoh bagi masyarakat. Selanjutnya setelah itu Pemkot akan terjun ke masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan program Makassar Ta Tidak Rantasa.

Tentu saja dalam pelaksanaan program ini konsep yang jelas serta kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan program ini harus di perhatikan. Karena tanpa konsep yang jelas dan kesiapan pemerintah dan masyarakat yang masih kurang maka program ini akan sulit terlaksana.

Berdasarkan kondisi diatas maka maka peneliti bermaksud untuk mengetahui konsep pelaksanaan program Makassar Ta Tidak Rantasa serta efektifitas pelaksanaan program ini.



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa di Kota Makassar

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Kota Makassar adalah ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang menjalankan program Makassar Ta Tidak Rantasa dalam mengatasi masalah persampahan di daerahnya.

Secara khusus penelitian ini mengambil 3 sampel kecamatan yang merupakan SKPD pelaksanaan program makassar ta tidak rantasa di Kota Makassar yaitu:

1. Kecamatan Tamalanrea (Sebagai Kawasan Pendidikan)
2. Kecamatan Manggala (Sebagai Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Makassar)
3. Kecamatan Wajo (Sebagai Kawasan Perdagangan dan Wilayah Lokalisasi)

3.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program Makassar Ta tidak rantasa

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga proses pengumpulan data yaitu Studi Literatur, Studi Media, dan Wawancara.

A. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan melalui buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan program Makassar Ta Tidak Rantasa. Melalui studi literatur maka diharapkan dapat memperkaya serta memperdalam pengetahuan dan landasan-landasan teori penulis dalam mengkaji penelitian ini.

B. Studi Media

Studi media dilakukan untuk membantu dalam memberikan informasi terbaru akan penelitian ini dengan memantau perkembangan berita di media Lokal maupun Nasional.

C. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memberi data untuk membantu menyempurnakan hasil penelitian secara mendalam dengan responden yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab antara penulis dengan responden. Untuk itu diperlukan kemampuan dalam hal melontarkan pertanyaan kepada responden.

Wawancara bertujuan untuk membantu membuktikan hasil penelitian secara empirik berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun Informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah:

- Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
- Camat Tamalanrea
- Camat Wajo
- Camat Manggala

3.4. Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan telah lengkap, maka akan dilakukan analisis data dan dilakukan penjabaran dan mendeskripsikan program Makassar Ta Tidak Rantasa berdasarkan data yang telah didapatkan.

Analisis data dimaksudkan untuk menganalisa data-data literatur yang akan dibenturkan dengan hasil wawancara atau kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan ini maka akan memperjelas gambaran hasil penelitian ini.

3.5. Definisi Oprasional

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mencoba menjabarkan definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan.

A. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksud menggunakan pendekatan teori oleh Dunn (1981) "kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang,

kelompok, atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menaggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki”.

B. Program

Program merupakan wujud nyata yang berisi kegiatan dan tindakan-tindakan yang sistematis dari suatu kebijakan yang masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran serta sarana. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka dibuatlah program yang secara oprasional dapat dilaksanakan oleh setiap perangkat kerja

C. Efektivitas

Penulis menggunakan pendekatan teori efektivitas dari Richard M. Steers (1985) yang mengatakan “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melupakan cara dan sumber daya serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Pendekatan tersebut terdiri atas tiga indikator yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

D. Makassar Ta Tidak Rantasa

Makassar Ta Tidak Rantasa yang dimaksud adalah program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah kebersihan lingkungan (persampahan) di Kota Makassar. Program ini menjadikan kecamatan sebagai sebagai dinas yang secara langsung menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dalam rangka menjadikan setiap daerahnya bersih.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar. Dengan demikian secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kecamatan memiliki hak otonom dalam menjalankan setiap kegiatan di wilayahnya masing-masing untuk menyukseskan program ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan profil Kota Makassar dan penjelasan hasil penelitian.

4.1 Profil Kota Makassar

Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Tanggal 31 Agustus 1971 nama Kota Makassar berubah menjadi Ujung Pandang, hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971. Saat itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 Km² menjadi 115,87 Km², terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Pada masa jabatan Presiden BJ. Habibie nama Kota Makassar dikembalikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. Dalam konsederan perubahan tersebut disebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan mendapat dukungan DPRD Tk. II dan perubahan ini sejalan dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, bahwa perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, hal tersebut hasil dari semua elemen masyarakat Kota Makassar mulai dari Budayawan, Pemerintah, dan Masyarakat yang mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarah Makassar.

4.1.1. Letak Geografis Kota Makassar

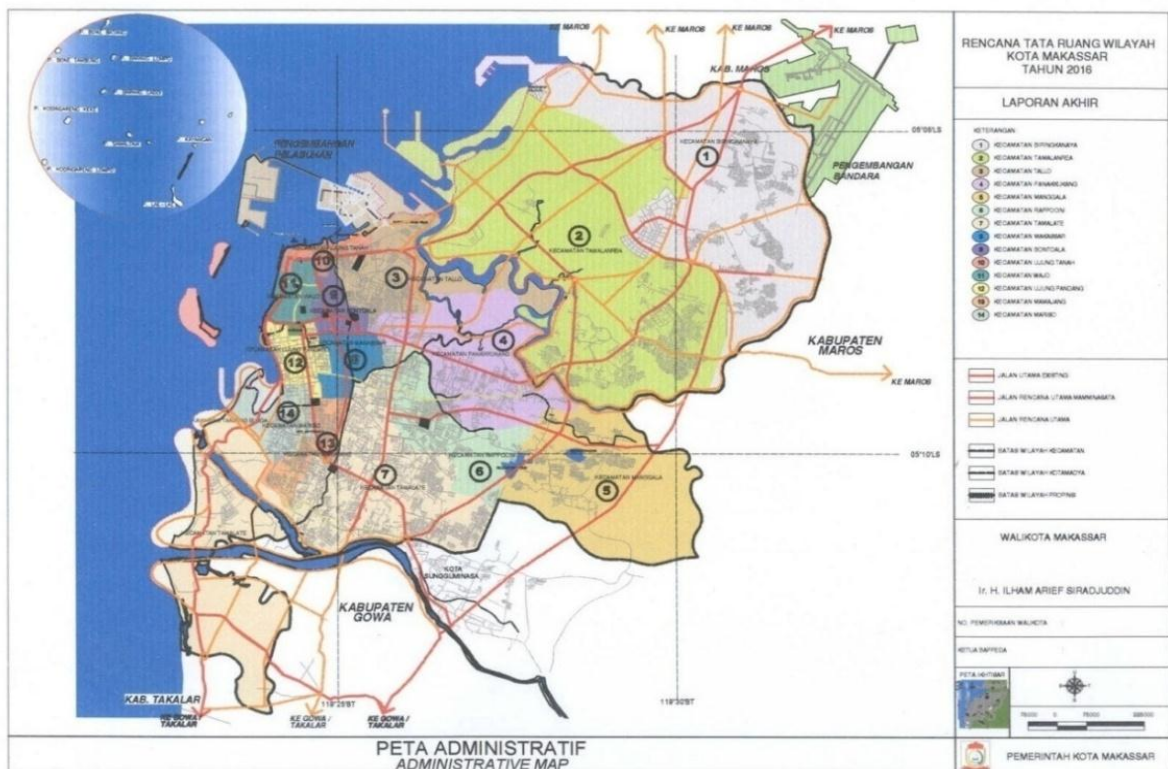
Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir Pantai Barat bagian Selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Gowa, Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Maros, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5-10 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km² yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 Kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar.

Gambar 4.1 : Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar



Sumber : WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar

Adapun pulau-pulau wilayah Kota Makassar merupakan bagian dari dua kecamatan yaitu kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang yang terdiri dari 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang. Pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-lumu, Pulau Bone

Tambung, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-lae, Pulau Gusung dan Pulau Kayangan.

Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di kota Makassar tahun 2013

No.	Kode wil.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Persentase terhadap luas kota Makassar
1	010	Mariso	1,82	1,04
2	020	Mamajang	2,25	1,28
3	030	Tamalate	20,21	11,50
4	031	Rappocini	9,23	5,25
5	040	Makassar	2,52	1,43
6	050	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	060	Wajo	1,99	1,13
8	070	Bontoala	2,10	1,19
9	080	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	090	Tallo	5,83	3,32
11	100	Panakuk kang	17,5	9,70
12	101	Manggala	24,14	13,73
13	110	Biringkanaya	48,22	27,43
14	111	Tamalanrea	31,84	18,12
15	7371	Kota Makassar	175,77	100,00

Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2014

Berdasarkan table 4.1 di atas Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di kota Makassar pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kecamatan biringkanaya adalah kecamatan terluas

di kota Makassar dengan luas 48,22 km² dan persentase terhadap luas kota Makassar yaitu 27,49%. Sedangkan kecamatan wajo adalah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 1,99 km² dan persentase terhadap luas kota Makassar yaitu 1,13%.

4.1.2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2013 tercatat sebesar 1.408.027 jiwa yang terdiri dari 696.086 laki-laki dan 671.986 perempuan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar dimungkinkan akibat terjadinya arus urbanisasi karena faktor ekonomi, pendidikan, dan juga Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan Sulawesi Selatan serta pusat perdagangan di Kawasan Indonesia Timur.

Penduduk Kota Makassar yang berjumlah 1.408.027 jiwa tersebar di 14 Kecamatan. Namun persebaran tersebut tidak merata, hal tersebut disebabkan konsentrasi penduduk berbeda pada tiap kecamatan, serta kebijakan pemerintah tentang penetapan lokasi pembangunan rumah pemukiman penduduk dan lokasi pengembangan kawasan industri juga berbeda.

Penyebaran penduduk kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di wilayah kecamatan biringkanaya, yaitu sebanyak 195.906 atau sekitar 13,91 persen dari total penduduk, disusul kecamatan tamalate sebanyak 182.939 jiwa (12,99 persen), kecamatan rappocini sebanyak 156.665 jiwa

(11,13 persen), dan yang terkecil adalah kecamatan wajo sebanyak 26.477 jiwa (1,88 persen).

4.1.3. Visi Kota Makassar

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang dijelaskan dan dijabarkan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota Makassar 2025 dan visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018.

Visi Kota Makassar 2025 adalah **“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”**. Visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018 adalah **“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”**. Terhadap visi Kota Makassar 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang relevan dengan isu strategis Kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah:

“Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”

Visi Pemerintah Kota Makassar 2019 ini memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2025, khususnya dengan penekanan visi RPJPD pada “orientasi global”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”, serta penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua”. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD, dalam visi RPJMD 2013-2018 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya

kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok difabel). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya “pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi”

4.1.4. Misi Kota Makassar

Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Misi selanjutnya diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga dan disabilitas, (3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8) pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”.

Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berkelas Dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman kelas dunia”.

Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal (1) peningkatan pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, (3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke

rumah, (5) pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pelayan publik kelas dunia bebas korupsi”.

4.1.5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, unruk mewujudkan visi pembangunan daerah kota Makassar selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pengertian tujuan dalam RPJMD ini adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.

4.1.6. Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar merupakan perangkat kerja daerah Kota Makassar yang dibentuk agar dapat memfasilitasi pelayanan masyarakat dibidang penanganan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan dan mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup dengan efektif dan efisien.

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

4.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan, penghijauan, keindahan kota, penyelenggaraan kebersihan persampahan, penanganan pemakaman dan tempat penanganan akhir sampah di Kota Makassar.

Adapun fungsi dari Dinas Pertamanan dan kebersihan yaitu sebagai berikut :

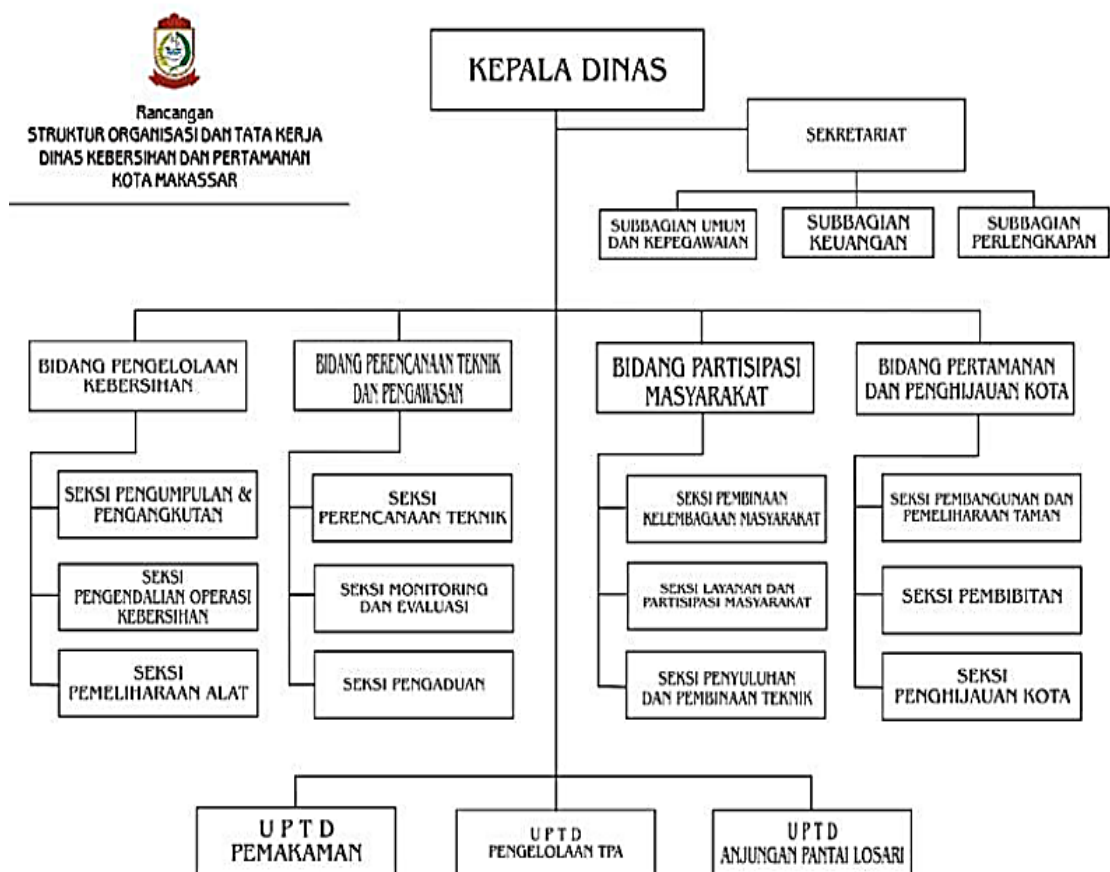
- 1) Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota,

penyelenggaraan kebersihan/persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

- 2) Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- 3) Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- 4) Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- 5) Pelayanan perizinan pemakaman
- 6) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional penanganan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- 7) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- 8) Pembinaan unit pelaksana teknis

Adapun struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar



4.1.8. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea memiliki luas wilayah 31,84km² dengan jumlah penduduk 89.143 jiwa. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan elevansi 1-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan.

Salah satunya adalah Universitas Hasanuddin sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak.

Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai berbatasan langsung dengan laut dan bagian muara Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai yang cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan ParangLoe).

Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil sepanjang sekitar 20m di Lantebung (Kelurahan Bira). Potensi sumberdaya alam yang masih dapat ditemukan di kecamatan ini adalah tambak. Secara keseluruhan lahan tambak di Kecamatan Tamalanrea yaitu 588 ha, dengan produksi perikanan darat (tambak) yaitu 190,10ton.

4.1.9. Kecamatan Manggala

Kecamatan manggala memiliki luas wilayah 24,14 km² atau sekitar 13,73 % dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan

laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibanding kecamatan lainnya yaitu 827ha dan 411ha dengan potensi produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki potensi kecil. Tahun 2008 produksi hanya sekitar 59,10 ton atau senilai 1.156.200 rupiah.

Meskipun di sub sektor perikanan kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dengan jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak besar (sapi dan kerbau) 1352 ekor sedangkan untuk ternak kecil (kambing) 1.016 ekor.

4.1.10. Kecamatan Wajo

Kecamatan Wajo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km Atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 35.011 jiwa dengan kepadatan 17.593 jiwa/km². Secara topologi kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pergeseran dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai.

4.2. Sampah Di Kota Makassar

4.2.1. Timbulan Sampah

Pada tahun 2014 timbulan sampah di Kota Makassar mencapai 4.301,18 m³ dan yang teratasi hanya sebesar 3.881,25 m³.

**Tabel 4.2 : DATA TIMBULAN SAMPAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014**

NO	NAMA KECAMATAN	TIMBULAN SAMPAH	TIMBULAN TERTANGANI
1	Mariso	187,36	169,09
2	Mamajang	207.17	186,95
3	Tamalate	522.09	471,12
4	Rapocini	490.40	442,52
5	Makassar	284.40	256,64
6	Ujung Pandang	98.24	88,65
7	Wajo	129.50	108,38
8	Bontoala	252.50	192,00
9	Ujung Tanah	250.50	149,76
10	Tallo	276.00	418,87
11	Panakuk kang	462.00	416,45
12	Manggala	345.00	306,52
13	Biringkanayya	485.00	398,45
14	Tamalanrea	310.52	275,87
		4.301,18	3.881,25

Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

Dengan melihat data di atas maka terlihat bahwa sebanyak 419,93 m³ sampah yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Hal tersebut merupakan masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh Kota Makassar.

4.2.2. Teknis Pembuangan Sampah

Dinas Pertamanan dan Kebersihan merupakan SKPD yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah di rumah tangga untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pada periode sebelumnya pengangkutan sampah dilakukan dan dikorniasi langsung oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, akan tetapi pada periode ini masalah pengangkutan sampah dilimpahkan langsung ke kecamatan agar saat terjadi masalah atau keluhan dari masyarakat dapat langsung dilaporkan ke kelurahan atau kecamatan, sehingga alur pelaporan dan penindaklanjutan dapat lebih cepat. Dalam wawancara dengan **Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat** menyebutkan :

“Ada dua model pelayanan dalam masalah persampahan ini. Jadi dari dua itu ada yang dilimpahkan ke kecamatan dan ada yang ditangani di sini. Yang ditangani Dinas Kebersihan adalah pelayanan sampah dari kontainer untuk dibawa ke TPA. Jadi untuk pengangkutan kerumah-rumah itu di kecamatan mulai dari jadwal pengambilan, mobil apa yang beroperasi itu diatur oleh kecamatan” (Hasil wawancara 2 september 2015)

Di setiap kecamatan telah disediakan truk kontainer Tangkasaki dan motor fukuda untuk melakukan pengangkutan di rumah-rumah dan lorong-lorong. Di setiap kecamatan telah dibuatkan jadwal pembuangan sampah yaitu pukul 18.00-20.00 WITA dan pengangkutan dilakukan 20.00 WITA. Jadwal tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat agar membuang sampahnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan **Sekcam Wajo** yang menyebutkan:

“Semua mobil dari dinas kebersihan kita atur. Yang dulunya mereka punya jalur kita atur ulang rutenya dan kita perketat jadwal keluarnya. Jadi kita sosialisasikan kemasyakat jadwal buang sampah pukul 18.00-20.00 dan mobil sampah dari dinas dan kecamatan keluar mengangkut sampah pukul 20.00” (Hasil wawancara 15 September 2015)

Untuk daerah kecamatan Tamalanrea pengangkutan sampah dilakukan 3 kali dalam sehari. Untuk pengangkutan kerumah-rumah itu dilakukan 2 kali dalam sehari. Dalam wawancara dengan **Kasi Kebersihan Kec.Tamalanrea** menyebutkan:

“Pengangkutan sampah di sini 3 kali dalam sehari kalau di rumah itu 2 kali dalam sehari. Pengangkutannya itu dilakukan pagi, sore dan malam hari. Di jalan-jalan besar itu pakai mobil tangkasa kalau di lorong-lorong g pakai motor. Saat ini tiap truk menangani sampah di 2 kelurahan dibantu motor 2 tiap kelurahan. Nanti kita mau dikasi tambahan truk jadi nanti itu tiap truk tangani satu kelurahan” (Hasil wawancara 31 Agustus 2015)

Pembahasan di atas menunjukkan adanya perbedaan mekanisme pengangkutan dan pembuangan sampah di tiap-tiap kecamatan. Hal ini merupakan kebijakan yang diambil dari setiap kecamatan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam melakukan peningkatan manajemen persampahan, saat ini di kota makassar telah dibuat terminal sampah di setiap kecamatan. Terminal sampah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sementara dan disitu nantinya juga masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah yang dapat ditukar dengan beras setelah itu dibawa langsung ke TPA.

4.3. Konsep Pelaksanaan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa

4.3.1. Latar Belakang Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa

Bedasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelolah sampah di daerah masing-masing. Dalam pasal 5 Undang-undang Pengelolaan sampah menyebutkan bahwa:

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah termuat pada Bagian Ke empat Pasal 9 yang berbunyi:

1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
2. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar membuat Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa sebagai strategi dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Makassar. Inilah salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi permasalahan sampah yang kian tak terkendali.

Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa dibuat karena melihat kondisi lingkungan Kota Makassar yang kotor dan masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan, adanya fenomena masyarakat yang suka membuang sampah di sembarang tempat diwaktu sembarang, dan volume sampah di Kota Makassar juga terus meningkat.

Dari hal diatas maka muncullah pemikiran untuk menciptakan sebuah program yang dapat mengatasi hal tersebut dan dibutuhkan sebuah gerakan yang dapat menyadarkan masyarakat Kota Makassar untuk selalu menjaga kebersihan. Maka dari itu Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa Merupakan program yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah dan kebersihan di Makassar serta dalam rangka menyadarkan masyarakat akan cinta kebersihan.

4.3.2. Desain Pelaksanaan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa

Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh walikota dan wakil walikota makassar sebagai ruang, tempat dan wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kota Makassar lebih baik dan lebih maju.

Pengertian Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya masalah sampah akan tetapi dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kota Makassar harus berperilaku bersih. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan

Camat Tamalanrea yang menyebutkan bahwa:

“Makassar tidak rantasa merupakan sebuah wadah bagi masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan makassar lebih baik bahkan 2 kali lebih baik. Wujud dari Makassar tidak Rantasa itu luas bukan Cuma masalah kebersihan tapi sebagai sebuah gerakan mencakup semua layanan, yaitu layanan yang menjadi harapan masyarakat” (Hasil wawancara 31 agustus 2015)

Selain itu Sekcam Wajo juga menyebutkan bahwa Makassar tidak rantasa bukan hanya masalah sampah tetapi segala hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan hasil wawancara dengan **Sekcam**

Wajo yang menyebutkan bahwa :

“Makassar bukan cuma kebersihan, Makassar tidak rantasa luas cakupannya mulai dari kebersihan, kesadaran lingkungan kehidupan sosial juga tidak bisa rantasa. Seperti contohnya ada anak pemuda yang kita ketahui di lingkungan ini anak mudanya banyak yang putus sekolah, otomatis dari segi MTR kita lihat hidupnya rantasa, tidak ada kegiatannya, menganggur. Dan disinilah pemerintah dan tokoh masyarakat yang mengerti tentang MTR hadir di tengah mereka karena pasti hidupnya itu rantasa kalau anak pengangguran” (Hasil wawancara 15 September 2015)

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan **Camat**

Manggala:

“Jadi Makassar tidak rantasa itu bukan bahasa Indonesia dia bahasa Makassar jadi dia itu adalah gerakan moral. MTR itu masalah peduli lingkungan. Pengertian Pak wali tentang MTR itu bukan cuma masalah kebersihan tapi dari segala aspek kehidupan mulai dari kebersihan, begal, tauran, minum-minum itu semuanya rantasa. jadi semua hal dalam keseharian” (Hasil wawancara 28 September 2015)

Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa (Gemar MTR) merupakan program pencanangan cinta akan kebersihan. Gerakan Makassar Tidak Rantasa ini merupakan gerakan moral yang diharapkan dapat merekonstruksi pemikiran rakyat akan kebersihan dan pola hidup sehat. Hal ini dilakukan karena pemerintah Kota Makassar sadar bahwa untuk mengatasi permasalahan sampah dibutuhkan program yang khusus untuk menanganinya. maka dari itu dibentuklah program Gemar MTR yang menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam menjadikan lingkungan Kota Makassar bersih dan terbebas dari masalah persampahan. Hal ini dilakukan dengan merubah pola pikir masyarakat tentang sampah dan lingkungan bersih/ tidak rantasa.

Program ini diharapkan bisa merubah pola pikir masyarakat yang dulunya sering membuang sampah sembarang tempat dapat berubah menjadi hidup bersih dan lingkungan Kota dapat terbebas dari masalah persampahan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan tentang desain pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu Jargon, Kegiatan dan Pelibatan Elemen

Pendukung. Ketiga pendekatan inilah yang dinilai oleh penulis sebagai cara untuk mencapai tujuan dari Gemar MTR.

4.3.2.1. Jargon Pendukung Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa

Dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa, Pemerintah Kota juga menggunakan jargon yang dapat membantu tercapainya Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa. Jargon yang digunakan adalah LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa.

1. LISA merupakan singkatan dari Lihat Sampah Ambil. Jargon ini banyak dijumpai di spanduk-spanduk, dinding sekolah-sekolah dan dinding-dinding lorong Kota Makassar. Jargon ini bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat agar setiap kali melihat sampah di sekitar mereka agar segera memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. LISA merupakan jargon yang mendukung program Gemar MTR dalam menjaga kebersihan lingkungan, dalam menjaga itu dibutuhkan semua elemen yang ada di Kota Makassar baik itu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Jargon ini juga didukung dengan program pengadaan tempat sampah gendang dua. Diharapkan masyarakat saat melihat sampah agar memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah gendang dua yang telah disediakan oleh pemerintah kota makassar.

2. MABELO yang merupakan singkatan dari Makassar Bersih Lorong. MABELO juga merupakan jargon yang mendukung Gemar MTR yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat Kota Makassar utamanya yang tinggal di lorong-lorong Kota Makassar agar selalu membersihkan halaman rumah dan membersihkan lorong sekitar tempat tinggalnya.
3. Makassar Bebas Sampah atau yang disingkat MABASA merupakan jargon yang biasa kita jumpai di pojok-pojok jalan Kota Makassar. Jargon ini ditujukan agar masyarakat Makassar tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Jargon inilah yang mendukung program Gemar MTR dalam mengatasi masalah persampahan dan merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah disembarang tempat.
4. Aku dan Sekolahku tidak rantasa, merupakan jargon yang berada di sekolah-sekolah agar selalu hidup bersih dan tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Pemerintah kota menyadari bahwa salah satu tempat yang paling efektif dalam membudayakan hidup bersih adalah di sekolah baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Para guru sejatinya mendidik siswanya agar memelihara kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dalam menjaga kebersihan itu diawali dengan usia dini dan pendidikan dini. Maka dari itu Sekolah merupakan tempat yang paling efektif dalam

menanamkan pentingnya hidup bersih dan sehat. Sebagaimana hasil wawancara dengan **Camat Manggala** yang menyebutkan :

“yang perlu kita pertajam adalah pendidikan dini di TK, SD, SMP masalah peduli lingkungan. Itulah cara bagaimana lingkungan dapat bersih dari sejak dini harus diajar mencintai kebersihan dan tidak suka dengan hal-hal yang jorok” (Hasil wawancara 28 september 2015)

4.3.2.2. Kegiatan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa

Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa memiliki tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak rantasa dalam kehidupan sehari-hari dan selalu hidup bersih. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah telah membuat kegiatan baik ditingkat Kota Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. Kegiatan yang dilakukan adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, dan Sosialisasi Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (GEMAR MTR), Sampah Tukar Beras.

1. Lorong Garden (LONGGAR)

Program Longgar ini merupakan program yang memanfaatkan lorong-lorong kota agar lebih produktif. Lorong yang ada ditata agar lebih indah, bersih dan hijau dengan tanaman sayur, tomat, cabai dan lainnya. Masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman yang dapat bernilai ekonomis atau dapat dikonsumsi sehari-hari. Untuk menunjang program tersebut, pemerintah berupaya membuat Badan Usaha Lorong yang nantinya tanaman hasil dari lorong garden tersebut dapat dijual di badan usaha tersebut. Dengan program ini maka

diharapkan lorong-lorong yang ada menjadi lebih produktif, bersih dan tertata indah.

2. Kerja Bakti

Dalam mencapai tujuan perubahan pola pikir masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat, maka pemerintah Kota Makassar membuat jadwal kerja bakti yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat membersihkan lingkungan kerja, rumah dan lingkungannya. Dalam pelaksanaan kerja bakti tersebut diharapkan agar segala elemen kota Makassar dapat berperan aktif baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Secara konseptual, pelaksanaan kerja bakti tersebut dibagi menjadi 3 hari yaitu Jumat bersih, Sabtu bersih dan Minggu bersih. Semua elemen wajib berperan aktif dalam pelaksanaan kerja bakti tersebut baik pemerintah, karyawan swasta maupun masyarakat membersihkan di lingkungan sekitar.

Yang pertama Jumat bersih itu ditujukan untuk pegawai pemerintahan maupun karyawan swasta mengadakan kerja bakti di wilayah tempat berkerja masing-masing, Sabtu bersih ditujukan kepada sekolah-sekolah baik murid, dan guru untuk membersihkan sekolah masing-masing. Selanjutnya untuk Minggu bersih ditujukan kepada semua masyarakat baik yang berstatus pegawai atau karyawan swasta saat berada di rumah dia kembali menjadi masyarakat dan wajib untuk turun kerja bakti membersihkan lingkungan rumah atau lorong-lorong rumah.

3. Sosialisasi Gemar MTR

Gerakan Makassar Ta tidak rantasa yang telah di canangkan oleh pemerintah Kota Makassar tentu harus disosialisasikan. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengenal dan memahami apa yang dimaksud dengan Makassar Ta Tidak Rantasa dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisai Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan tanggung jawab kelurahan. Bentuk sosialisasi kelurahan itu dilakkukan dari rumah ke rumah dengan membagikan brosur-brosur.

4. Gerakan Sampah Tukar Beras

Dalam rangka penanaman budaya bersih di masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah dikota makassar, maka gerakan sampah tukar beras merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut.

Gerakan ini dilakukan dalam meningkatkan manajemen persampahan dan mengubah prilaku masyarakat yang suka membauang sampah sembarangan. Program ini selaras dengan program 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) yang dimana masyarakat dapat memilah sampah organik dan anorganik. Setelah itu, sampah anorganik tersebut dapat dia kumpulkan dan ditukar di bank sampah dan menjadi tabungan bagi masyarakat yang menukarkan sampahnya tersebut. Dengan demikian sampah yang ada akan bernilai ekonomi bagi masyarakat. Setelah

sampah ditukar di bank sampah maka tugas pemerintah untuk mengolah sampah-sampah anorganik tersebut baik dengan membangun pengolahan sampah anorganik sendiri maupun bekerja sama dengan perusahaan swasta yang siap bermitra dengan pemerintah.

Dengan adanya program Gerakan Sampah Tukar beras ini maka masyarakat akan kurang membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat malah akan memilah kembali sampah-sampah yang bernilai ekonomi tersebut. Inilah salah satu cara merubah pola pikir masyarakat yang dulunya melihat sampah sebagai suatu masalah berubah menjadi sampah adalah hal yang bernilai ekonomi dan juga perilaku hidup tidak rantasa itu pasti tercapai.

4.3.2.3. Pelibatan Elemen Pendukung

Dalam desain Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa keterlibatan elemen-elemen pendukung merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya. Adapun elemen pendukung dari Gemar MTR antara lain Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat / Kepemudaan dan masyarakat itu sendiri.

Untuk menyukseskan Gemar MTR maka diperlukan hubungan kerja sama antar elemen baik pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dan masyarakat maupun masyarakat dengan ormas.

Kerja sama antar elemen pendukung sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan Gemar MTR. Secara konseptual penulis mencoba

menjelaskan hubungan kerja sama yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Kerja sama warga dan pemerintah merupakan hal yang paling berperan dalam menyukseskan Gemar MTR. Untuk mewujudkan itu maka secara konseptual terdapat forum untuk mewadahi kerja sama tersebut forum tersebut disebut FORKASIH merupakan Forum Kampung Bersih yang merupakan inisiator ataupun pengawas pelaksanaan kegiatan MTR di wilayah kampung masing-masing agar terciptanya kampung bersih. FORKASI merupakan garda terdepan di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Gemar MTR. Forum ini merupakan forum kerja sama antar Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Gemar MTR.
2. Hubungan kerja sama antar pemerintah juga merupakan hal yang tak kalah penting dalam menyukseskan Gemar MTR. Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Setiap SKPD di Kota Makassar memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan. Pembagian wilayah kerja ini dibuat agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Pembagian wilayah kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan kepada wilayah kerja dan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah pola pikir tentang sampah sekaligus sebagai pendampingan terhadap pelaksanaan 3R.

3. Organisasi Masyarakat juga memiliki andil dalam pelaksanaan program Gemar MTR. Ormas dalam hal ini memiliki peran dalam membuat kegiatan-kegiatan pendukung MTR seperti kerja bakti, penataan lorong dan sosialisasi Gemar MTR itu sendiri. Beberapa ormas yang berperan dalam pelaksanaan MTR seperti KNPI, Brigadir 08 Kota Makassar, Purna Praja IPDN, Mapala se-Kota Makassar dan lain sebagainya.
4. Kerja sama Swasta adalah hal yang tak dapat dilupakan. Dimana swasta merupakan salah satu elemen dalam menyukseskan segala kebijakan maupun program-program pemerintah. Demikian pula dengan Gemar MTR swasta juga berperan dalam menyukseskan MTR ini. Pada periode ini, terdapat program Sampah Tukar Beras dimana program ini mendapat bantuan dari pihak swasta dalam pengolahan maupun penjualan sampah anorganik yang telah dikumpulkan di bank sampah.

4.3.3. Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta Tidak

Rantasa

Kebijakan merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah yang disesuaikan

dengan kondisi lingkungan. Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Kebijakan tentang program Makassar Ta Tidak Rantasa. kebijakan ini sesuai dengan pendekatan Dunn (1981) yang menyebutkan “kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki”.

Pelaksanaan program Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan program yang ditujukan untuk merubah pola pikir masyarakat dan juga sebagai salah satu cara dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen persampahan.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Program Gemar MTR ini maka penulis menggunakan teori Richard M. Steers dengan melihat 3 indikator dalam mengukur efektivitas pelaksanaannya. Indikator tersebut yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

4.3.3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan digunakan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dari pemerintah/organisasi. Pada penelitian ini, pencapaian tujuan yang dimaksud adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik

dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

1. Kurun Waktu

Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan program yang ditujukan agar masyarakat bisa berperilaku hidup sehat, program ini diperkenalkan pada warga Kota Makassar pada tanggal 15 juni 2014 saat acara A'bbulo Sibatang Lompoayang digelar di *Celebes Convention Centre* (CCC) Jalan Metro Tanjung Bunga. Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa telah memasuki usia satu setengah tahun berjalan maka diharapkan adanya peningkatan pola pikir masyarakat.

Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan program tanggungjawab Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Gemar MTR sendiri tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan **Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dianas Pertamanan dan Kebersihan** (Bapak Abdullah) menyatakan :

“Makassar Ta tidak Rantasa itu diawali dengan kata-kata Gemar, Gerakan Masyarakat Ta Tidak Rantasa. Jadi dua suku kata Gerakan Makassar Ta dan Tidak Rantasa. Kenapa dia gerakan, bukan program, gerakan itu karena ada hal yang sangat mendesak termasuk masalah kebersihan dianggap sangat mendesak akhirnya bukan tidak dibutuhkan program, dibutuhkan program tapi tidak cukup. program itu ada waktu jumlah dana ada tenaga yang terurai tetapi dengan gerakan tidak punya waktu berapa lamanya untuk selesai, kapan selesainya itu berakhir dengan sendirinya” (Hasil wawancara 2 september 2015)

Berdasarkan wawancara di atas maka terlihat bahwa pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa tidak memiliki jangka waktu yang artinya program ini tidak memiliki capaian jangka pendek. Program Gemar MTR merupakan program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2014-2019 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian tujuan pelaksanaan Gemar MTR itu jangka menengah selama 5 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kasi Penegembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pertamanan dan Kebersihan** bahwa :

“MTR ini tidak dapat di ukur dalam waktu satu tahun, setidaknya 5 tahun akan datang, tapi tanda-tanda keberhasilan sudah ada. Artinya secara kuantitatif dia tidak dapat diukur” (Hasil wawancara 2 september 2015)

Dengan demikian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program kerja dari sisi waktu masih sulit dikarenakan program ini tidak memiliki capaian jangka pendek.

2. Sasaran/Tujuan

Efektivitas pelaksanaan Program Gemar MTR dapat dinilai dari seberapa jauh capaian sasaran atau tujuan dari program ini. Apabila tujuan dari pelaksanaan program ini telah dicapai sebelum batas waktu yang ditentukan maka dapat dikatakan bahwa program tersebut telah berjalan dengan efektif. Sebaliknya jika sampai batas waktu program dan tujuan pelaksanaan tidak tercapai, maka program tersebut dapat dinilai belum efektif.

Gerakan Makassar Tidak Rantasa ini merupakan gerakan moral yang diharapkan dapat merekonstruksi pemikiran rakyat akan kebersihan dan pola hidup sehat. Gemar MTR ini juga merupakan gerakan untuk meminimalis masalah persampahan di Kota Makassar.

Efektivitas dari pelaksanaan program Gemar MTR tersebut dapat diketahui dari tujuan di atas dimana tujuan dari sasaran pelaksanaan tersebut telah tercapai atau belum tercapai. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan capaian tujuan Gemar MTR maka dapat ditinjau dari kegiatan Gemar MTR seperti Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, dan Sosialisasi Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa (GEMAR MTR), serta Sampah Tukar Beras.

2.1. Lorong Garden

Program Lorong Garden (LONGGAR) bertujuan sebagai pemanfaatan lahan lorong-lorong agar menjadi lebih produktif, bersih dan tertata indah. Program Longgar merupakan salah satu program andalan pemerintah kota makassar dalam meningkatkan keindahan tata Kota.

Program longgar merupakan tanggungjawab dari bidang pertamanan dan penghijauan kota, Dinas pertamanan dan kebersihan yang bertujuan untuk menuju tata ruang kota yang nyaman sesuai dengan visi Walikota Makassar Menuju Kota Dunia yang nyaman untuk semua.

Kegiatan ini telah dilakukan pada 14 kecamatan di kota makassar seperti Jl. Gunung merapi Kec. Ujung pandang, Ir. 323 Kec. Tamalate, Jl. Anggrek Ir. 3 Kec. Mariso, Jl. Onta lama Kec. Mamajang, Jl. Maccini

tengah Kec. Makassar, Jl. Toddopuli 1 Kec. Rappocini, Jl. Toddopuli 2
Kec. Panakkukang, Jl. Borong raya 2 Kec. Manggala, Jl.dg.ramang Kec.
Biringkanaya, Jl. Ar. Hakim kec. Tallo, Jl. Yos sudarso, Kec. Ujung tanah,
Jl. Cumi-cumi timur Kec. Bontoala, dan Jl. Kodingareng Kec. Wajo. Dari
14 kecamatan tersebut, sudah sebanyak 70 lorong yang telah
melaksanakan LONGGAR dan diharapkan setiap tahunnya akan terus
bertambah. Dalam wawancara dengan **Kasi Pengembangan Partisipasi
Masyarakat** menyebutkan:

“Kalau kita mengatur lorong di kota ini hampir 90% kota ini menjadi
bagus. Karena komunitas yang paling banyak itu ada di lorong. Jalan
protokol cuma berapa dan jalan ateri cuma berapa. Jalan-jalan yang
masuk itu adalah lorong, itu sebenarnya pemukiman penduduk.
Tahun 2015 ini sudah ada 70 lorong yang ikut lomba Lorong Garden.
Kalau selama satu tahun ini sudah ada 70, kalau nanti 5 tahun itu
sudah banyak lorong yang akan ikut melakukan kegiatan Lorong
Garden ini” (Hasil wawancara tanggal 2 september 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat kita ketahui
harapan dari Pemerintah Kota terhadap kegiatan longgar adalah untuk
menjadikan Kota Makassar bersih tidak hanya di jalan-jalan umum tetapi
juga di lorong-lorong jalan. Karena pada umumnya dikota-kota lainnya
saat kita melihat jalan protokol itu sangat bersih tetapi ketika memasuki
lorong di suatu daerah maka akan terlihat sampah yang berserakan.

Salah satu prestasi dari Kegiatan Longgar ini adalah pada saat
Acara Asean Mayors Forum (AMF), Lorong Garden ini telah mendapat
apresiasi dari walikota-walikota dari negara tetangga dan juga telah
menjadi inspirasi bagi delegasi Filipina untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Selain itu, saat kunjungan dari Kementerian Pertanian program ini mendapat apresiasi dan bahkan akan diusulkan menjadi program nasional kementerian pertanian. Hal tersebut disampaikan Dany Pomanto dalam acara pembukaan Getar 1.000 Lorong.

“Saat mendampingi Pak Amran Sulaiman (Mentan) meninjau pasar di Makassar baru-baru ini, Beliau tertarik dan memuji program LONGGAR. Sehingga Beliau akan mengusulkan memasukkan sebagai program pemerintah pusat” (Nafli Mas’ud. Diakses di <http://wartatimur.com/lorong-garden-diusulkan-jadi-program-nasional.html>, pada 6 November 2015)

Kecamatan tamalanrea merupakan salah satu wilayah yang menjalankan kegiatan Lorong Garden. Untuk kecamatan tamalanrea dalam menjalankan program ini, pemerintah kecamatan dan kelurahan hanya bertugas untuk mensosialisasikan, manajemen dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Longgar. Untuk pengadaan Pot, bibit dan lainnya itu diserahkan oleh masyarakat. Hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan **Camat Tamalanrea** yang menyebutkan :

“Dalam menata lorong garden atau biasa disingkat Longgar itu masyarakat sendiri yang mengeluarkan biaya, masyarakat yang beli potnya, bibitnya, bunganya itu mi sebenarnya gerakan. Gerakan itu tidak ada uangnya. Nah disitulah sebenarnya dilihat kepemimpinannya camat dan lurah bagaimana manajemen itu dengan memotivasi, memberi semangat masyarakat, menghimbau, mensosialisasikan. Itu sudah tugas kita itu”. (Hasil Wawancara 31 Agustus 2015)

Dengan melihat pembahasan di atas maka terlihat bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi, terlihat dari antusiasme masyarakat dalam menata lorong sangat besar walaupun tidak ada bantuan dana dari pemerintah kecamatan atau kelurahan. Masyarakat berinisiatif untuk membeli maupun

membuat pot, menyediakan bunga dan bibit yang akan di tanam. Kegiatan ini telah dilakukan di 14 kecamatan dengan jumlah lorong yang berpartisipasi sebanyak 70 lorong.

2.2. Kerja Bakti

Kerja Bakti merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menjadikan Makassar Bersih. Kegiatan ini diharapkan agar segala elemen kota Makassar dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Secara konseptual, pelaksanaan kerja bakti tersebut dibagi menjadi 3 hari yaitu Jumat bersih, Sabtu bersih dan Minggu bersih.

Jumat bersih itu ditujukan untuk pegawai pemerintahan maupun karyawan swasta, Sabtu bersih itu di sekolah-sekolah dan Minggu bersih itu ditujukan kepada seluruh masyarakat.

Program ini dibagi atas tiga karena mengingat sasaran dari kegiatan ini berbeda-beda yaitu hari Jumat adalah pegawai pemerintah dan swasta untuk turun kerja bakti membersihkan lingkungan kerja/kantor, hari Sabtu untuk sekolah dimana semua elemen sekolah baik murid, guru dan pegawai sekolah tersebut turut membersihkan, dan hari Minggu sendiri untuk masyarakat umum agar membersihkan lingkungan sekitar.

Dalam wawancara dengan **Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat** menyebutkan pembagian waktu dan tempat kerja bakti adalah:

“Di dalam MTR itu ada beberapa kegiatan. Apa-apa kegiatan tersebut adalah ada yang namanya Jumat bersih, Sabtu bersih dan Minggu bersih. Kenapa dibagi 3, Jumat bersih untuk kantor

pemerintah, kantor swasta atau karyawan. Jadi Jumat bersih ada gerakan pembersihan. Kemudian Sabtu bersih itu umumnya disekolah. Disekolah itu kan biasa ada kegiatan ekstra kurikuler, termasuk didalamnya kegiatan masalah-masalah persampahan bagaimana menata disekolahnya. Itu kan semua gerakan tidak ada anggrannya tapi dia bergerak ada keinginan yang kuat untuk merubah Makassar dengan perilaku bersih. Kemudian Minggu bersih adalah semua masyarakat terlibat di kegiatan Minggu bersih. Itu kegiatan yang mendorong Makassar bersih” (Hasil wawancara tanggal 2 September 2015)

Pelaksanaan kerja bakti telah dilakukan di tiap-tiap kecamatan. Di Kecamatan Tamalanrea misalnya, kerja bakti tersebut telah dibuat jadwal setiap minggunya. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan Camat Tamalanrea:

“Keterlibatan masyarakat pada Program MTR itu seperti kerja bakti. Sejak saya di sini saya perintahkan kepada 6 lurah saya untuk membuat jadwal, kita buat jadwal kerja bakti selama satu tahun. Jadi dalam satu minggu itu, setiap hari Minggu itu sudah bergiliran RW ini, RW ini untuk kerja bakti. Kalau mau buktinya lihat mi ki hari Minggu nanti kita jalan-jalan pasti ada yang kerja bakti. Itu kelibatan masyarakat” (Hasil wawancara 31 Agustus 2015)

Selain itu di Kecamatan Wajo juga melakukan kerja bakti berdasarkan pembagian jadwal kerja. Selain itu pemerintah juga terus mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan kerja bakti. Berdasarkan hasil wawancara, **Sekam Wajo** menyatakan :

“Jadwal kerja bakti di Manggala itu hari Jumat untuk pegawai, hari Sabtu sekolah, murid-muridnya juga turun semua kami hadir di situ juga dan hari Minggu itu masyarakat. Bentuk kerja sama dan kepedulian kita terhadap masyarakat kalau mereka melakukan itu kita turunkan juga petugas kami membackup. Jadi masyarakat itu sebenarnya kalau mereka melakukan itu kami juga hadir ditengah-tengah mereka menyediakan paling tidak pengangkutan, menyediakan anggota paling tidak mengangkut sampahnya. Kalau kami tidak ada ditengah-tengah mereka terus terang kalau masyarakat kota seperti ini maka kepeduliannya kurang tapi kalau pemerintah hadir ditengah-tengah mereka, maka mereka akan termotifasi” (Hasil wawancara tanggal 15 September 2015)

Dengan melihat pembahasan di atas maka untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kerja bakti di kecamatan Tamalanrea, kecamatan Wajo dan kecamatan Manggala, perlu adanya evaluasi beberapa kegiatan kerja bakti yang dilakukan masyarakat di masing-masing kecamatan.

Seperti halnya kecamatan Tamalanrea yang telah melakukan beberapa kegiatan kerja bakti. Sebagai contoh sejak tahun 2014 kegiatan ini telah dilaksanakan di kecamatan Tamalanrea. Dalam sebuah kutipan dari berita online:

“Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto melaunching kerja bakti massal serentak tingkat TK,SD,SMP, SMA/SMK negeri/swasta Se-Kota Makassar, di SMPN 30, Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar, Jumat (29/8/14). Kerja bakti massal ini mengambil tema “Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa”, kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulannya setiap tanggal 9, pukul 09.00 pagi – sampai selesai seluruh siswa se-kota Makassar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Mahmud B.M. mengatakan sebanyak 300.000 siswa TK, SD, SMP, SMA/SMK melakukan gerakan aku dan sekolah ku tidak rantasa” (Karebosi Pos. Diakses di <http://www.karebosipost.com/2014/08/walikota-makassar-danny-launching-mtr-di-seluruh-sekolah-mulai-dari-tk-hingga-sma-sederajat/pada-6-November-2015>)

Selain itu di kelurahan tamalanrea jaya juga telah melakukan kerja bakti pada 14 oktober 2015. Kerja bakti dilakukan di RW01. Di RW 01 kelurahan tamalanrea telah dijadwalkan untuk melakukan kerja bakti minimal sebulan sekali. Dalam sebuah kutipan di situs resmi RW1 Kelurahan Tamalanrea Jaya disebutkan :

“Setelah pengangkutan sampah sudah dirasa membaik, warga menilai kebersihan lingkungan bukan hasil kerja satu dua kali saja, tetapi harus berkali-kali dan terus menerus. Itulah sebabnya ketua Rw.1 mengajak warganya untuk terus melakukan pembenahan lingkungan dalam bentuk kerja bakti dua kali sebulan baik kerja bakti

massal maupun kerja per lorong” (Situs RW1 Tamalanrea. Diakses di <https://rwsatu.wordpress.com/2015/10/14/rw-1-bertekad-kerja-bakti-tiada-henti/>, pada 7 November 2015)

Dalam situs tersebut juga disebutkan bahwa pada 12 September 2015 Kelurahan Tamalanrea Jaya telah melakukan kerja bakti dalam rangka memperbaiki drainase di jl. bung lorong 2.

Pada tanggal 18 september 2015 pemerintah kecamatan Tamalanrea mengadakan kerja bakti di sekitar pintu nol Unhas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Tamalanrea bapak Kaharuddin, S.IP. dalam kegiatan tersebut Camat Tamalanre mengatakan dalam sebuah kutipan dari artikel online dituliskan:

“Jumat bersih ini rutin kami lakukan. Kegiatan ini kita gelar secara bergiliran di enam kelurahan. Pagi ini kami di RW 9 RT 4 Tamalanrea Indah. Semua kita libatkan mulai dari staf kecamatan, ormas dan warga lainnya,” kata Kaharuddin disela-sela memimpin kerja bakti di pintu nol Unhas. Sejak awal saya memimpin Tamalanrea misi kami adalah mewujudkan MTR. Itu kami lakukan dengan menggiatkan aksi kebersihan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat” (Opa. Diakses di <http://liputan8.com/camat-tamalanrea-pimpin-jumat-bersih-di-pintu-nol-unhas/> pada 7 November 2015)

Kecamatan Wajo juga telah mengadakan kerja bakti dalam mendukung Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa dalam sebuah artikel disebutkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 di Kelurahan Antang telah dilakukan kerja bakti bersama masyarakat.

“Pada hari jumat kemarin jajaran pegawai Kecamatan Manggala dan Kelurahan Antang, Kota Makassar menggelar kerja bakti di depan SMA Neg.12 Makassar. Kegiatan kerja bakti dipimpin langsung oleh Sekcam Manggala, H.Ruly, S.Sos, M.si. Kerja bakti ini rutin dilakukan setiap hari Jumat dan dilakukan secara bergiliran di tiap kelurahan untuk menyukseskan program Makassar Tidak Rantasa’

(MTR)" (Mad. Diakses di <http://www.kabarmakassar.com/berita-foto-kerja-bakti-di-manggala/> pada 7 November 2015)

Selain itu setiap hari sabtu dan minggu di Kelurahan Batu dilakukan kerja bakti. Dalam sebuah kutipan artikel, warga RT 04 RW 06 mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah, warga RT 04 RW 06 mendukung program MTR melalui kerja bakti massal yang dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau ada peralatan, pasti lebih mudah membersihkan lingkungan. Makanya kami butuh alat kebersihan Kami dulu dijanjikan, tapi sampai sekarang belum ada" (Radar Makassar. Diakses di <http://radarmakassar.com/warga-batua-terapkan-mtr/2292/> pada 7 November 2015)

Pelaksanaan kerja bakti di Kelurahan Batu kurang aktif dalam membantu masyarakat kerja lingkungan sekitar. Peran aktif pemerintah belum maksimal terbukti dari telatnya bantuan alat dari pemerintah kelurahan.

Untuk kecamatan Wajo, kerja bakti dilakukan setiap hari minggu. Selain bersama masyarakat, kerja bakti juga dapat dilakukan bersama organisasi pemuda atau ormas. Seperti kerja bakti yang dilakukan oleh alumni SMP 5 berkerja sama dengan pemerintah kecamatan melakukan kerja bakti di sekitar jalan Nusantara. Dalam sebuah kutipan berita online, disebutkan bahwa:

"Kerja bakti ini setiap hari minggu dilakukan membersihkan sampah dan menggali selokan yang tersumbat. Tujuannya untuk memberi contoh kepada warga agar selalu menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan ke dalam selokan,kali ini kerja bakti dilakukan bersma alumni SMP 5 Makassar". (Budi. Diakses di <http://upeks.co.id/loker/alumni-smp-5-angkatan-89-kerja-bakti.html> pada 8 November 2015)

Kerja bakti tersebut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk membersihkan sekitar rumah. Inilah yang ingin dicapai dalam Gemar MTR untuk merubah pola pikir masyarakat untuk selalu hidup bersih.

Dengan melihat pembahasan di atas sangat jarang pelaksanaan kerja bakti yang dilakukan oleh pihak swasta dan pelaksanaan kerja bakti hanya difokuskan pada hari minggu. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pelaksanaan pembagian waktu kerja bakti yang dijadwalkan setiap hari jumat, sabtu dan minggu.

2.3. Sosialisasi MTR

Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa yang telah di programkan oleh pemerintah Kota Makassar harus terus disosialisasikan. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengenal dan memahami apa yang dimaksud dengan Gemar MTR.

Di kecamatan Tamalanrea proses sosialisasi telah dilakukan walaupun belum dirasa maksimal oleh pemerintah kecamatan. Dalam wawancara dengan **Camat Tamalanrea** menyebutkan:

”Peletakan dasar itu tidak gampang, butuh sosialisasi untuk kegiatan tersebut. selama ini belum jalan efektif utamanya untuk tempat sampah gendang dua, masyarakat belum mengerti tujuan dibuatnya tempat sampah itu. Proses sosialisasi ini tidak sekali tapi harus berulang-ulang. Proses untuk mendirikan kesadaran masyarakat itu bukan hanya sekali tapi terus diulang-ulang karena untuk merubah kebiasaan masyarakat itu tidak gampang. Kami juga sudah mempunyai program untuk sosialisasi itu ini masuk di anggaran kami bagaimana mensosialisasikan Makassar Ta Tidak Rantasa” (Hasil wawancara 31 Agustus 2015)

Kecamatan Manggala sosialisasi Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa tidak memiliki cara khusus atau waktu khusus dalam pelaksanaannya. Sosialisasi dilakukan di tiap kegiatan kecamatan dan diamanpun kecamatan terus melakukan himbauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Camat Manggala** menyebutkan bahwa

“Itu sosialisasi bukan berapa banyak tapi tiap kita ketemu kita tiap masuk di masjid itu kita himbaukan itukan sosialisasi dimana-mana harus kita sosialisasi tidak mengenal ruang dan tempat. Sepanjang ada waktu dan kesempatan kita sosialisasikan. Setiap ada kegiatan kecamatan kita sosialisasikan walaupun sekarang memang tidak ada kegiatan khusus, tapi setiap ada ketemu masyarakat kita sisipkan” (Hasil wawancara 28 september 2015)

Sama halnya kecamatan Manggala yang selalu mensosialisasikan Gemar MTR baik di forum formal maupun tidak. Kecamatan Wajo juga selalu mengingatkan ketua RT dan RW agar terus mensosialisasikan warganya untuk hidup bersih dan tidak rantasa. Dalam wawancara dengan **Sekcam wajo** dijelaskan bahwa:

“Banyak hal yang dilakukan dalam menyukseskan MTR. Kami dari pihak kecamatan di setiap pertemuan baik formal dan non formal tidak henti-hentinya memberikan informasi kepada tokoh masyarakat, utamanya RT/RW ini karen mereka adalah perpanjangan kami dari pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tidak usah mi dulu muluk-muluk tentang MTR cukup dulu itu bagaimana masyarakat bisa merubah pola pikirnya bahwa kebersihan itu adalah kebutuhan terus bagaimana mentaati perturan tentang jadwal pembuangan sampah. Kalau itu sudah terwujud Insya Allah fisik yang namanya kebersihan itu akan terwujud” (Hasil wawncara 15 September 2015)

Inilah bentuk sosialisasi Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa yang dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan.

2.4. Sampah Tukar Beras

Dalam rangka penanaman budaya bersih di masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah dikota makassar, maka Gerakan Sampah Tukar Beras merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Gerakan ini di lakukan dalam meningkatkan manajemen persampahan dan mengubah prilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.

Hasil wawancara dengan bapak Abdullah **Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pertamanan dan Kebersihan** menjelaskan tentang Pelaksanaan Gerakan Sampah Tukar Beras :

“Sampah tukar beras ini untuk tahun 2014 itu bukan masuk dalam anggaran kita, itu sumbangan dari beberapa perusahaan dengan total timbangan 6 ton dan dilakukan di kelurahan balaparang. Tahun 2015, baru teranggarkan karena anggarannya baru di tetapkan tahun ini. Tahun 2015 ini kita coba Rp.900.000.000,- untuk sampah tukar beras. Tapi inikan berproses, untuk Juli dan Agustus sudah ada 16 bank sampah yang sudah melakukan kerja sama dengan total hasil timbangan 6 ton dengan nilai Rp 22.000.000,-. Ini dilakukan secara bertahap karena kita pemerintah tidak serta merta dikelurkan harus ada prosedur, kriteria dan siapa yang harus kerja sama . Saat ini sudah ada 125 bank sampah yang sudah mengusulkan untuk melakukan kerja sama dengan Dinas Pertamanan Dan Kebersihan. Tapi masih akan diverifikasi lagi” (Hasil wawancara 2 September 2015)

Untuk mengasi masalah yang muncul dari pelaksanaan Sampah Tukar Beras ini, maka pemerintah membuat bank sampah pusat yang bertugas sebagai pengawas perkembangan harga dimasyarakat dan bank sampah. Hal tersebut disampaikan oleh **Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat:**

“Kita telah membentuk bank sampah pusat yang fungsinya seperti bank Indonesia. Inikan di dalam bisnis sampah ada juga biasa permainan. Misalnya bank sampah sudah melakukan pengumpulan sampah di masyarakat, tiba-tiba bulan depan ada yang sabotase menurunkan harga. Jadi inilah fungsinya bank sampah pusat yang melihat perkembangan harga yang sewajarnya. Kalau lemah harga di pengepul dia kasi tinggi lagi harganya supaya hidup ini bank sampah” (Hasil wawancara 2 september 2015)

Untuk menilai Efektivitas pelaksanaan Gemar MTR perlu dilihat dari indikator pencapaian tujuan. Adapun sub indikator yang digunakan pada pembahasan di atas adalah waktu dan sasaran tujuan dimana kedua sub tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Penulis menilai adanya ketidaksesuaian antara pendekatan teori yang diambil dengan pelaksanaan program Gemar MTR. Dimana dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah teori dari Richard M Street (1985) yang mengatakan “untuk menentukan capaian tujuan perlu adanya pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya”.

Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan pelaksanaan Gemar MTR yang tidak memiliki jangka waktu pendek yang berarti dari sisi waktu MTR tidak memiliki periodisasi dan pentahapan tujuan. Hal ini berdampak terhadap pencapaian tujuan kegiatan-kegiatan dari MTR yang cukup sulit dievaluasi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dari sudut pandang penulis dapat menyimpulkan bahwa capaian tujuan pelaksanaan program ini belum efektif.

4.3.3.2. Integrasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Proses sosialisasi pada penelitian ini merupakan segala proses yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam memperkenalkan program Gemar MTR baik dalam bentuk formal maupun non formal.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bentuk sosialisasi Gemar MTR terdiri dari sosialisasi di ruang formal dan sosialisasi di ruang tidak formal.

Hal tersebut di jelaskan oleh **Sekcam Wajo** :

“Banyak hal yang dilakukan dalam menyukseskan MTR. Kami dari pihak kecamatan di setiap pertemuan baik formal dan nonformal tidak henti-hentinya memberikan informasi kepada tokoh masyarakat, utamanya RT/RW. ini karen mereka adalah perpanjangan kami dari pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tidak usah mi dulu muluk-muluk tentang MTR cukup dulu itu bagaimana masyarakat bisa merubah pola pikirnya bahwa kebersihan itu adalah kebutuhan terus bagaimana mentaati perturan tentang jadwal pembuangan sampah. Kalau itu sudah terwujud Insya Allah fisik yang namanya kebersihan itu akan terwujud” (hasil wawancara 15 September 2015)

Hal tersebut juga disampaikan oleh **Camat Manggala** sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Itu sosialisasi bukan berapa banyak tapi tiap kita ketemu kita sosialisasikan. Tiap masuk di masjid itu kita himbaukan. Itukan sosialisasi dimana-mana harus kita sosialisasikan tidak mengenal ruang dan tempat. Sepanjang ada waktu dan kesempatan, kita sosialisasikan. Setiap ada kegiatan kecamatan kita sosialisasikan walaupun sekarang memang tidak ada kegiatan khusus, tapi setiap

ada ketemu masyarakat kita sisipkan” (Hasil wawancara 28 september 2015)

Dengan melihat penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisiasi dari Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa dilakukan didalam kegiatan formal maupun tidak formal. Jadi disetiap pertemuan resmi ataupun dalam saat kerja bakti dan bertemu masyarakat pemerintah kecamatan terus menerus berupaya untuk mensosialisasikan Program Gemar MTR.

Dari sisi integrasi berdasarkan desain Gemar MTR pada pembahasan sebelumnya maka untuk menilai efektivitas, penulis membagi langkah-langkah pemerintah dalam dua sisi yaitu pertama sisi nonformal yang merupakan pelaksanaan kegiatan yang tidak terikat terhadap aktor pelaksana yaitu melalui jargon dan kedua sisi formal yaitu pelibatan elemen-elemen pendukung yang memiliki hirarki.

Dari sisi nonformal dalam pengaplikasiannya maka digunakan Jargon seperti LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) serta Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Jargon ini banyak kita lihat di dinding-dinding maupun spanduk-sapanduk yang ada di Kota Makassar. Jargon-jargon ini juga merupakan bentuk sosialisiasi tidak langsung terhadap Gemar MTR karena ini merupakan jargon yang dibuat dalam menyukseskan Gemar MTR. Selain itu tujuan dari keempat jargon tersebut adalah merubah pola pikir masyarakat dan menjadikan Makassar bebas dari masalah persampahan.

Pada sisi formal, dapat terlihat bahwa belum terintegrasinya elemen-elemen dalam mensosialisasikan dan pencapaian tujuan Program Gemar MTR. Inilah salah satu hal yang membuat tidak maksimalnya pelaksanaan Gemar MTR karena upaya yang dilakukan dalam mengintegrasikan hal tersebut belum tercapai.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menilai bahwa pelaksanaan program Gemar MTR belum efektif walaupun sosialisasi dilakukan disetiap saat baik forum formal maupun tidak formal. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi ini tidak merata di masyarakat sebagaimana secara teoritis untuk menilai efektivitas dari indikator integrasi menurut Richard M. Street bahwa perlu adanya sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi. Seharusnya Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW aktif mensosialisasikan Gemar MTR langsung ke rumah-rumah warga. Tidak hanya pada pertemuan formal atau diumumkan di masjid-masjid. Selain itu penyebaran brosur sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami manfaat dari MTR. Selain itu penggunaan jargon juga belum secara maksimal merubah pola pikir masyarakat.

Dalam pengembangan konsensus hal yang dilakukan belum berjalan baik. Sebagai contoh untuk meningkatkan konsensus maka digunakan pembagian wilayah binaan. Inilah yang dapat digunakan pemerintah dalam rangka meningkatkan konsensus yang ada di masyarakat. Akan

tetapi pada pelaksanaannya wilayah binaan yang dibuat pemerintah tidak berjalan secara baik.

Selain itu kegiatan untuk melakukan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah harusnya dijalin melalui Forum Kampung Bersih dan Hijau (FORKASIH) hal tersebut sesuai dengan SK Walikota tentang pembagian wilayah binaan Makassar Ta tidak Rantasa. akan tetapi setelah satu tahun berjalan hingga saat ini belum ada FORKASIH yang dibentuk di empat belas kecamatan kota Makassar. Inilah yang membuat konsensus untuk pelaksanaan gemar MTR tidak berjalan maksimal.

Dari penjelasan di atas dengan melihat indikator capaiannya maka dapat dikatakan bahwa elemen yang seharusnya berperan dalam program Gemar MTR belum terintegrasi efektif. Jadi secara keseluruhan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa belum terintegrasi secara efektif.

4.3.3.3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Pada penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan penyesuaian program terhadap lingkungan lebih khusus hubungan antar tiap elemen yang mendukung pelaksanaan program Gemar MTR ini. Tentunya dalam menjalankan program ini dibutuhkan pelaksana program. Berdasarkan hasil penelitian, telah dijelaskan pada bab sebelumnya ada beberapa hubungan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program Makassar Ta

Tidak Rantasa yaitu hubungan Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat, Kerjasama antara pemerintah (SKPD), Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah dan Masyarakat, Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

1. Secara konseptual di tiap kecamatan wajib membentuk FORKASIH yang merupakan singkatan dari Forum Kampung Bersih. Forum ini merupakan wadah bagi pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pendukung Gemar MTR. Dalam Surat Keputusan Walikota Makassar poin ketiga memutuskan bahwa :

“Mewajibkan kepada para Camat untuk segera membentuk Forum Kampung Bersih dan Hijau (FORKASIH) tingkat kecamatan guna mendukung program **Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa (Gemar MTR)** dengan melibatkan para fasilitator dan kader lingkungan di wilayah masing-masing yang selama ini aktif dalam kegiatan Makassar Green and Clean”

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada kecamatan yang membentuk FORKASIH. Pada umumnya kegiatan antara masyarakat dan pemerintah hanya berupa kerja bakti yang terlebih dahulu disosialisasikan jadwalnya oleh pemerintah.

Di Kecamatan Wajo dibentuk Relawan MTR ditingkat masyarakat untuk membantu dalam menjalankan kegiatan Gemar MTR hal tersebut disampaikan oleh **Sekcam Wajo** dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Relawan MTR sebenarnya kami menginginkan adanya keterlibatan masyarakat sebagai penggerak, jadi bukan cuma pemerintah. Itu relawan tidak digaji tapi mau meluangkan waktu

dan tenaga untuk membersihkan lingkungan. Jadi dia sebagai motivasi bagi masyarakat lain supaya ikut membersihkan” (Hasil wawancara 15 September 2015).

2. Kerjasama antara pemerintah merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tiap program, utamanya Gemar MTR. Pelaksanaan kerja sama ini telah didukung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang pembagian wilayah binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pelaksanaan program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Setiap SKPD di Kota Makassar memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan. Pembagian wilayah kerja ini dibuat agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa.
3. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan juga sangat dibutuhkan. Beberapa kali organisasi kemasyarakatan telah melakukan kegiatan dalam menyukseskan Gemar MTR. Beberapa ormas yang melakukan kegiatan dalam mendukung Gemar MTR antara lain adalah Praja IPDN, dalam sebuah berita online disebutkan:

“Para alumni Purna Praja sekota Makassar, kembali menyisir dan membersihkan sampah yang berserakan di sepanjang Metro Tanjung Bunga depan Rumah Sakit Siloam, dan sekitar Masjid Terapung, Sabtu (10/01/2015). Aksi ini sebagai wujud dukungan terhadap Makassar Tidak Rantasa’ (MTR) yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Makassar” (Hidayat. Diakses di <http://www.kabarmakassar.com/purna-praja-makassar-kerja-bakti-dukung-mtr/> pada 15 November 2015)

Selain Purna Praja IPDN, Organisasi Pramuka Kota Makassar bersama PMI makassar dan TNI-AL juga membuat kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan Gemar MTR. Hal tersebut dimuat dalam berita online :

“Sejumlah anggota Pramuka kwartir Cabang Makassar dibantu Relawan PMI Makassar, BPBD dan Marinir TNI Angkatan Laut membersihkan sampah di pinggir laut Pantai Losari Makassar, kegiatan aksi pramuka yang dibantu PMI, BPBD Makassar dan Marinir guna membantu Pemerintah Kota Makassar menjalankan program Makassar Tidak Rantasa (MTR)” (Daniel. Diakses di <http://makassar.antaranews.com/berita/67070/pramuka-cabang-makassar-bersihkan-sampah-pantai-losari> pada 15 November 2015)

Hal yang sama juga dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI yang membuat kerja bakti bersama masyarakat. Dalam sebuah artikel online disebutkan:

“Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar akan menggelar kerja bakti massal sebagai bentuk dari dukungannya terhadap program pemerintah kota yakni gerakan masyarakat Makassar Tidak Rantasa/jorok (MTR). menurut ketua KNPI Makassar Amran Mannahawu menyebutkan bahwa Kami dari unsur kepemudaan akan selalu mendukung program-program pemerintah kota hanya yang pro untuk rakyat demi kemaslahatan bersama dan kami dari kalangan pemuda siap untuk itu” (Daniel. Diakses di <http://makassar.antaranews.com/berita/57350/knpi-gelar-kerja-bakti-dukung-mtr-pemkot> pada 15 November 2015)

4. Swasta merupakan elemen pendukung dalam setiap program dari pemerintah. Dalam hal ini pihak swasta pada umumnya berperan sebagai penyedia anggaran dalam menjalankan program pemerintah. Dalam pelaksanaan Program Gemar MTR beberapa perusahaan swasta telah berperan aktif dalam mendukung setiap

kegiatan yang dilakukan. Seperti kegiatan Sampah Tukar Beras yang pada tahun 2014 pemerintah mendapatkan bantuan dana oleh perusahaan. Hal tersebut disebutkan oleh bapak **Abdullah, Kasi Pemeberdayaan Partisipasi Masyarakat Dinas Pertamanan dan Kebersihan** dalam sebuah wawancara menyebutkan:

“untuk tahun 2014 Sampah tukar beras mendapatkan dana dari beberapa perusahaan karena dana untuk itu belum masuk dalam anggaran kami. dana untuk sampah tukar beras itu sumbangan dari perusahaan swasta melalui dinas ketenagakerjaan” (Hasil wawancara 2 September 2015)

Selain itu beberapa perusahaan yang mendukung pelaksanaan program Gemar MTR adalah Bank Mandiri. Dalam sebuah berita online disebutkan :

“PT Bank Mandiri Tbk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program Gerakan Masyarakat Makassar Ta’ Tidak Rantasa (Gemar MTR) atau Makassar Bersih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Dana CSR yang diberikan sebesar Rp.672.000.000 kepada Pemerintah Kota Makassar” (Parlin. Diakses di <http://moneter.co/bank-mandiri-salurkan-csr-untuk-gemar-mtr/> pada tanggal 15 November 2015)

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Pelabuhan Indonesia IV juga turut berpartisipasi dalam menyukseskan program Gemar MTR. PT.pelindo menyumbangkan truk sampah kepada Pemkot. Dalam berita online antara news disebutkan:

“PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV memberikan bantuan berupa satu unit truk sampah kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk dukungannya terhadap program Gerakan Masyarakat Makassar Tidak Rantasa/jorok (Gemar MTR). Bantuan berupa truk sampah yang diserahkan itu merupakan bagian dari kepedulian Pelindo terhadap program (Gemar MTR) yang digalakkan Pemkot saat ini. Tidak hanya

bantuan truk, PT.Pelindo juga memberikan bantuan renovasi taman di sepanjang Anjungan Pantai Losari agar taman-taman itu menjadi bagian dari keindahan kota". (Daniel. Diakses di <http://makassar.antaranews.com/berita/58667/pt-pelindo-sumbang-truk-sampah> pada 15 November 2015)

Dengan melihat penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa cukup efektif dari sisi adaptasi. Hal tersebut karena dalam hubungan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan tersebut sudah berjalan cukup baik. Partisipasi dari ormas, swasta dan pemerintah itu cukup baik. Namun, bukan berarti kegiatan ini tidak memiliki kekurangan. Dari sisi partisipasi masyarakat belum ada peningkatan secara signifikan. Selain itu yang masih menjadi kekurangan adalah belum adanya Forum kerjasama antara pemerintah dan masyarakat seperti FORKASIH.

4.3.4. Analisis Kritis

Pembahasan ini merupakan hasil analisis dari penulis yang bersangkutan dengan pelaksanaan program Gemar MTR. Baik hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan Program Gemar MTR maupun secara tidak langsung.

4.3.4.1. Analisis teori kebijakan

Dengan menggunakan teori kebijakan oleh Dunn (2003) menyebutkan "kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha

mencapai tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki". Maka langkah yang di ambil oleh Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Makassar merupakan suatu kebijakan yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan melihat permasalahan dan kondisi lingkungan.

4.3.4.2. Kekurangan Program Gemar MTR

Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan di Kota besar adalah sampah. Maka dari itu dengan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa diharapkan masalah persampahan yang dialami oleh Kota Makassar dapat teratasi. Ini merupakan langkah yang cukup baik yang diambil oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Akan tetapi bukan berarti kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota tidak memiliki kekurangan. Penulis mencoba memeberi analisis kritis terhadap kekurangan-kekurangan dalam penanganan persampahan khususnya terkaiat akan pelaksanaan program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa.

Menurut penulis kebijakan yang di ambil oleh pemeritah Kota Makassar kurang maksimal. Beberapa hal yang membuat kegiatan tersebut berjalan kurang maksimal adalah:

1. Tidak Memiliki Perda atau Perwali

Program Makassar Ta Tidak Rantasa tidak memiliki perda atau perturan walikota yang mengatur tentang peksanan program ini. Dengan tidak adanya Perda atau Perwali yang mengatur tentang program Makassar Ta Tidak Rantasa, maka tidak ada naskah yang menjelaskan

tentang konsep pelaksanaan dari program ini. Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa Makassar Ta Tidak Rantasa ini bukan cuma masalah sampah akan tetapi segala aspek kehidupan. Ini membuat konsep dari Gemar MTR semakin tidak jelas. Hal tersebut juga berdampak terhadap pelaksanaan program yang sulit dinilai pencapaian tujuan kegiatan.

2. Tidak Memiliki Batasan Waktu

Berdasarkan teori efektivitas dari Richard M Streers yang menyebutkan setiap program harus memiliki periodik dan pentahapan capaian. Penulis menilai bahwa salah satu kekurangan dari pelaksanaan program Gemar MTR adalah tidak memiliki jangka waktu.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa program ini tidak memiliki rencana pelaksanaan jangka pendek yang membuat yang berdampak tidak adanya capaian jangka pendek. Hal tersebut yang membuat program ini sulit untuk dinilai capaian pelaksanaan program. Hal ini jelas membuat program ini sulit untuk dievaluasi

3. Pengelolaan sampah di TPA yang kurang efektif.

Setelah melakukan pemilahan, pemebersihn dan pengangkutan maka pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu masalah yang juga dihadapi oleh Pemkot. Dalam wawancara dengan **Camat Manggala** menyebutkan:

“Kebersihan itu intinya jangan memindahkan masalah, bersih di sini sampahnya dipindahkan di sini. Tidak suka dengan jorok” (Hasil wawancara 28 September 2015)

Ini merupakan sebuah masalah dari proses manajemen persampahan yaitu di Kota Makassar sendiri seolah-olah terlihat hanya memindahkan sampah dari rumah-rumah warga ke TPA. Ini disebabkan karena sampah yang ada di TPA belum dapat dikelola dengan baik. Tidak adanya industri pengolahan sampah yang dimiliki oleh pemerintah kota untuk mengolah sampah baik organik maupun anorganik. Jika pemerintah dapat menjalankan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle maka sampah organik dan anorganik dapat dikelola dengan baik. Dalam wawancara dengan **Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pertamanan dan Kebersihan** menyebutkan:

“Untuk pemilahan sampah organik dan anorganik sekarang ini kan tidak mudah merubah masyarakat, mungkin dia sudah pintar recycle tapi proses pemasarannya harus bersaing dengan swasta. Pernah kita coba di TPA untuk pemanfaatan gas metan tapi tidak maksimal karena kita tidak pilah sampahnya na yang banyak menghasilkan gas metan itu kan sampah organik” (Hasil wawancara tanggal 2 september 2015)

Pada pembahasan di atas disebutkan kendala dalam menjalankan pengolahan sampah di TPA itu akibat sulitnya dilakukan pemilahan sampah yang berakibat pemanfaatan sampah jadi kurang efektif.

Penulis menilai usaha pemerintah dalam menjalankan peraturan menteri Nomor 13 untuk melakukan pengolahan sampah itu sudah mulai

berjalan walaupun belum berjalan secara maksimal. Telah dijelaskan pada Bab sebelumnya tentang bank sampah dan sampah tukar beras. Ini merupakan upaya dalam merubah pola pikir masyarakat agar dapat melakukan pemilahan agar sampah yang dihasilkan dari rumah tangga nantinya dapat diolah dengan lebih maksimal oleh pemerintah kota.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Desain Pelaksanaan program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa menggunakan tiga pendekatan yaitu Jargon, Kegiatan dan Pelibatan Elemen Pendukung. Adapun jargon yang digunakan pada pelaksanaan Program Gemar MTR adalah LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Kegiatan-kegiatan dari Gemar MTR adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, Sosialisasi Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa (GEMAR MTR), dan Sampah Tukar Beras. Dalam hal pelibatan elemen pendukung, hal yang dilakukan adalah menjalin kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dan masyarakat serta masyarakat dengan ormas.
2. Berdasarkan efektivitas pelaksanaan program, penulis menilai program Makassar Ta Tidak Rantasa berjalan kurang baik, hal tersebut dinilai menggunakan teori Richard M. Steers dengan indikator Pencapaian Tujuan, Integritas, dan Adaptasi. Dari ketiga pendekatan tersebut program Makassar Ta tidak Rantasa belum dapat memenuhi indikator-indikator tersebut.

3. Beberapa hal yang menjadi kekurangan program ini yaitu: 1. tidak memiliki aturan Perda ataupun Perwali, 2. tidak memiliki batasan waktu, hal tersebut berdampak terhadap pencapaian tujuan yang tidak jelas dan sulit untuk dievaluasi. 3. Pelaksanaan Program yang tidak Maksimal.

5.2. Saran

1. Pemerintah Kota Makassar harusnya lebih proaktif dalam mensosialisaikan kegiatan ini kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat untuk mencintai kebersihan dapat terwujud.
2. Pemerintah Kota Makassar harusnya membuat aturan pelaksanaan program Gemar MTR beserta capaian jangka pendek dan menengah agar program ini mudah untuk dievaluasi.
3. Pemerintah harus aktif menjalin kerjasama dengan semua elemen baik swasta, ormas, utamanya masyarakat untuk membuat Makassar bersih dan terhindar dari masalah persampahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Arief, Hasrat, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Bungin, M. Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dunn, Wliam N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press

Martini dan Lubis 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia

Nugroho, Riant, 2012, *Public Policy*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Parson, Wayne, 2011, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Paslong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta

Pomanto, Moh. Ramdhan & Syamsul Rizal, 2014, *8 Jalan Masa Depan; Mainstream Baru Pembangunan Makassar*, Makassar : Pelita Pustaka-Badan Arsip & Perpustakaan Makassar

Sudjana, Nana, 2005, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung : Sinar Baru Algensido.

Sukidin dan Damai Darmadi, 2011, *Administrasi Publik*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.

Steers, Richard M. 1985, *Efektifitas Organisasi*, Erlangga: Jakarta

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*
Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Peraturan-peraturan

Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang
Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah
(SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak
Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.

Perturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan*
Recycle melalui Bank Sampah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Makassar
Periode 2014-2019

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah

C. Sumber Lainnya

Budi, "Alumni SMP 5 Angkatan 89 Kerja Bakti" Upeks, 6 September 2015,
<http://upeks.co.id/loker/alumni-smp-5-angkatan-89-kerja-bakti.html>
diakses pada tanggal 8 November 2015 pukul 02.15

Daniel, "PT Pelindo Sumbang Truk Sampah" Antar News, 6 Oktober 2014,
<http://makassar.antaranews.com/berita/58667/pt-pelindo-sumbang-truk-sampah>
diakses tanggal 15 November 2015 pukul 22.36

Daniel, "Pramuka Cabang Makassar Bersihkan Sampah Pantai Losari",
Antara News, 10 Agustus 2015,
<http://makassar.antaranews.com/berita/67070/pramuka-cabang->

makassar-bersihkan-sampah-pantai-losari Diakses tanggal 15
November 2015 pukul 20.40 wita

Daniel, “KNPI Gelar Kerja Bakti Dukung MTR Pemkot”, Antara News, 22
Agustus 2014, <http://makassar.antarane.ws.com/berita/57350/knpi-gelar-kerja-bakti-dukung-mtr-pemkot> diakses 15 November 2015
pukul 20.53wita)

Hidayat, “Purna Praja Makassar Kerja Bakti dukung MTR”, Kabar
Makassar, 10 Januari 2015, <http://www.kabarmakassar.com/purna-praja-makassar-kerja-bakti-dukung-mtr/> diakses tanggal 15
Novembern 2015 pukul 20.30 Wita

Kamus Besar Bahasa Indinoesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/>

Karebosi Pos, “Walikota Makassar Danny: Lounching MTR di seluruh
sekolah mulai dari TK hingga SMA sederajat”, Karebosi Pos,29
Agustus 2014, <http://www.karebosipost.com/2014/08/walikota-makassar-danny-lounching-mtr-di-seluruh-sekolah-mulai-dari-tk-hingga-sma-sederajat/> diakses 6 November 2015 pukul 07.30 Wita

Mad, “Kerja Bakti di Manggala”, Kabar Makassar Member of Kabar Group
Indonesia, 23 Januari 2015, <http://www.kabarmakassar.com/berita-foto-kerja-bakti-di-manggala/> di akses tanggal 7 November 2015
pukul 14.25Wita

Mas’ud, Nafli, “Lorong Garden diusulkan jadi Program Nasional”, Warta
Timur,16 Juni 2015, <http://wartatimur.com/lorong-garden->

diusulkan-jadi-program-nasional.html, diakses 6 November 2015

Pukul 08.30

Opa, "Camat Tamalanrea Pimpin Jumat Bersih di Pintu Nol Unhas"

Liputan 8, 18 September 2015, [http://liputan8.com/camat-](http://liputan8.com/camat-tamalanrea-pimpin-jumat-bersih-di-pintu-nol-unhas/)

[tamalanrea-pimpin-jumat-bersih-di-pintu-nol-unhas/](http://liputan8.com/camat-tamalanrea-pimpin-jumat-bersih-di-pintu-nol-unhas/) diakses 7

november 2015 pukul 10.30 wita

Parlin, "Bank Mandiri Salurkan CSR untuk Gemar MTR" Moneter Refrensi

Ekonomi, 21 September 2014, [http://moneter.co/bank-mandiri-](http://moneter.co/bank-mandiri-salurkan-csr-untuk-gemar-mtr/)

[salurkan-csr-untuk-gemar-mtr/](http://moneter.co/bank-mandiri-salurkan-csr-untuk-gemar-mtr/) diakses tanggal 15 November 2015

pukul 22.30 wita

Radar Makassar, "Warga Batua Terapkan MTR" Radar Makassar, 3 Maret

2015, <http://radarmakassar.com/warga-batua-terapkan-mtr/2292/> di

akses 7 november 2015 pukul 15.10 Wita

RW 1 Tamalanrea, "RW-1 bertekad kerja bakti tanpa henti" (Situs RW-1

Tamalanrea), 14 Oktober 2015

[https://rwsatu.wordpress.com/2015/10/14/rw-1-bertekad-kerja-bakti-](https://rwsatu.wordpress.com/2015/10/14/rw-1-bertekad-kerja-bakti-tiada-henti/)

[tiada-henti/](https://rwsatu.wordpress.com/2015/10/14/rw-1-bertekad-kerja-bakti-tiada-henti/), diakses 7 november 2015 pukul 10.04 Wita



WALIKOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 660.2/1087/Kep/V/2014

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAKASSAR 'TA' TIDAK
RANTASA (GEMAR MTR) KOTA MAKASSAR**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) dipandang perlu adanya pembagian wilayah binaan dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAKASSAR TA' TIDAK RANTASA (GEMAR MTR) KOTA MAKASSAR
- KESATU : Membagi wilayah binaan kepada masing-masing SKPD/Unit Kerja dan Direksi Perusda dalam program **Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembinaan dimaksud diktum Kesatu, meliputi sosialisasi/edukasi untuk perubahan pola pikir, pendampingan teknis pengelolaan lingkungan dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui Bank Sampah, berikut program dukungan pembiayaan dalam APBD dan atau sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- KETIGA : Mewajibkan kepada para Camat untuk segera membentuk Forum Kampung Bersih dan Hijau (FORKASIH) Tingkat Kecamatan guna mendukung Program **Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR)** dengan melibatkan para fasilitator dan kader lingkungan di wilayah masing-masing yang selama ini aktif dalam kegiatan *Makassar Green and Clean*;

KEEMPAT : Keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja para Kepala SKPD/Unit Kerja, Direksi Perusda, sehingga dengan demikian wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Mei 2014



WALIKOTA MAKASSAR,

Moh. Ramdhan Pomanto

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Para Kepala SKPD Kota Makassar;
3. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Makassar;
4. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR : 660.2/1087/KeP/V/2014
 TANGGAL : 30 Mei 2014
 TENTANG : PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN PROGRAM MAKASSAR TA' TIDAK RANTASA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR

NO.	UNIT KERJA	KELURAHAN/WILAYAH BINAAN	KETERANGAN
1	Bagian Umum	1 Bulu Gading 2 Maloku 3 Losari	Ujung Pandang
2	Bagian Perlengkapan	4 Baru 5 Pisang Uatara	
3	Bagian Ortala	6 Lajangiru 7 Pisang Selatan	
4	Bagian Tata Pemerintahan	8 Sawerigading 9 Mangkura	
5	Bagian Kesra	1 Pattunuang 2 Ende	Wajo
6	Bagian Kerjasama	3 Melayu 4 Melayu Baru	
7	Bagian Hukum	5 Butung 6 Mampu	
8	Bagian Ekbang	7 Malimongan Tua 8 Malimongan	
9	Dinas Perhubungan	1 Panaikang 2 Karampuang 3 Tello Baru	Panakkukang
10	Dinas Pendidikan	4 Pampang 5 Pandang 6 Paropo	
11	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	7 Masale 8 Tamamaung 9 Sinrijala	
12	Lakhar BNK	10 Karuwisi 11 Karuwisi Utara	
13	Dinas Tenaga Kerja	1 Ballaparang 2 Buakana	Rappocini
14	Sekretariat DPRD	3 Rappocini 4 Banta-bantaeng	
15	Inspektorat	5 Tidung 6 Bonto Makkio	
16	Dinas Kesehatan	7 Karunrung 8 Gunung Sari	
17	Badan Diklat	9 Mapala 10 Kassi-kassi	Bontoala
18	Dinas PU	1 Gaddong 2 Wajo Baru 3 Tompo Balang	
19	BLHD	4 Malimongan Lompoo 5 Timongan Baru	
20	Bagian Protokol	6 Bontoala 7 Baraya	
21	PD BPR	8 Boantoala Parang 9 Bontoala Tua	
22	Dinas Perumahan	10 Parang Layang 11 Layang 12 Bunga Fiawa	

23	Dinas Pemadam Kebakaran		1 Mamajang Luar 2 Bonto Biraeng 3 Maricaya Selatan 4 Labuang Baji	Mamajang
24	Dinas Koperasi dan UKM		5 Mandala 6 Mamajang Dalam 7 Bonto Lebang	
25	Dinas Perindag		8 Pa'batang 9 Parang 10 Baji Mappakasunggu	
26	Dinas Kelautan		11 Tamparang Keke 12 Sambung Jawa 13 Karang Anyar	
27	Badan Pemberdayaan Perempuan		1 Gusung 2 Totaka 3 Tabaringan	Ujung Tanah
28	Badan Kepegawaian Daerah		4 Patingalloang 5 Patingalloang Baru	
29	Bagian Humas		6 Cambaya 7 Camba Berua	
30	BAPPEDA		1 La'latang 2 Kalukuang 3 Lembo 4 Bunga Ejaya Beru	Tallo
31	Dinas Sosial		5 Ujung Pandang Baru 6 Suangga 7 Rappojawa	
32	PD RPH		8 Panampu	
33	Dinas Pariwisata		9 Tallo 10 Buloa 11 Kaluku Bodoa 12 Lakkang	
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		13 Wala'walaya 14 Rappokalling 15 Tammua	Makassar
35	Kantor Ketahanan Pangan		1 Maricaya Baru 2 Maricaya	
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset		3 Lariang Bangngi 4 Maradekaya Utara 5 Maradekaya	
37	Dinas Pendapatan Daerah		6 Maccini Parang 7 Bara-baraya Utara 8 Bara-baraya 9 Bara-baraya Timur	
38	PD Pasar		10 Barana 11 Maccini Gusung 12 Maccini	
39	Badan Perizinan		13 Maradekaya Selatan 14 Bara-baraya Selatan	
40	PDAM		1 Kunjung Mae 2 Panambungan 3 Mario 4 Lette	Mariso
41	PD Parkir		5 Bontorannu 6 Tamarunang 7 Mattoanging	
42	Bagian Keuangan		8 Mariso 9 Kampung Buyang	

43	KORPRI	1 Batua 2 Antang		Manggala
44	Bagian Pertanahan	3 Borong		
45	Badan Pemberdayaan Masyarakat	4 Bangkala 5 Manggala 6 Tamangapa		
46	RSUD	1 Bira 2 Parang Loe 3 Kapasa		Tamalanrea
47	Dinas Pertamanan dan Kebersihan	4 Tamalanrea Indah 5 Tamalanrea 6 Tamalanrea Jaya		
48	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Maccini Sombala 2 Tanjung Merdeka 3 Barombong		Tamalate
49	Dinas Kominfo	4 Bongaya 5 Jongaya 6 Balang Baru		
50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7 Pa'baeng-baeng 8 Manuruki		
51	Badan Kesbang	9 Parangtambung 10 Mangasa		
52	Badan KB	1 Untia 2 Bulurokeng		Biringkənaya
53	Satpol PP	3 Sudiang 4 Pai'		
54	PD Terminal	5 Daya 6 Paccerakkang		
55	Badan Arsip	7 Sudiang Raya		



WALIKOTA MAKASSAR,

Moh. Ramdhan Pomanto